

**KESIAPSIAGAAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
STRATEGI DAN PENDEKATAN**

KESIAPSIAGAAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT STRATEGI DAN PENDEKATAN

Kata Pengantar: Iyang D. Sukandar

Edisi I. Jakarta: PMI 2007

iv + 80 hlm. 20 x 22 cm

ISBN: 979-9316-57-X

Edisi pertama: November 2007

Hak Cipta © Palang Merah Indonesia Pusat

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh Divisi Penanggulangan Bencana

Penyusun : Arifin Muhamad Hadi

Kontributor : Bevita Dwi Meidityawati

Lars Møller

Ujang Dede Lasmana

Editor : Enna Sudartama

Tata letak : Arwindra

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seijin tertulis dari Penerbit

Alamat Penerbit

Markat PMI Pusat

Jl. Gatot Subroto Kav. 96

Jakarta Selatan 12970

Disusun atas dukungan



Dansk Røde Kors
Danish Red Cross
Palang Merah Denmark

Dicetak atas dukungan

EUROPEAN COMMISSION



Humanitarian Aid

Daftar Isi

Daftar Isi		iii
Kata Pengantar		01
Bab I	Pengantar KBBM	03
Bab II	Strategi dan Pendekatan Program KBBM	07
Bab III	Kriteria dan Seleksi Desa/Kelurahan Mitra	17
Bab IV	Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi (PIMES)	21
Bab V	Sosialisasi, Advokasi dan Kemitraan	31
Bab VI	Pembentukan Tim Satgana dan Tim Sibat	39
Bab VII	Pendidikan dan Pelatihan KBBM	45
Bab VIII	Pelaksanaan Program KBBM	49
Bab IX	Mengintegrasikan Rencana Kerja KBBM dan Implementasinya	55
Bab X	Menjaga Keberlanjutan Program KBBM	61
Daftar Pilihan Tindakan Pengurangan Risiko Tingkat Desa		66

KATA PENGANTAR

Salah satu mandat Palang Merah Indonesia (PMI) adalah penanggulangan bencana. Kerja kemanusiaan ini, bukan saja merespon bencana yang terjadi, tetapi kesiapsiagaan bencana melalui Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM).

Sebenarnya, bukan hanya pada saat ini Indonesia dihantam oleh beragam bencana. Sudah lama wilayah Indonesia dikenal sebagai area yang sangat labil di dunia. Bumi yang kita pijak ini berada di antara Lempeng Eurasia dan Asia yang berpotensi menyebabkan gempa. Selain itu Indonesia memiliki deretan gunung api yang sebagian besar masih aktif, memanjang dari Sumatra, Jawa hingga Nusa Tenggara. Fakta menunjukkan, sebagaimana dikutip *Kompas* 29 Juni 2003, jumlah rata-rata korban bencana alam di Indonesia cenderung meningkat dalam kurun waktu 20 tahun. Jika pada tahun 1981-1990 jumlahnya berkisar 212.000 orang, tahun 1991-2000 jumlahnya berlipat menjadi 709.000 orang. Indonesia berada di urutan ketiga negara-negara di Asia yang paling sering dilanda bencana alam selama periode 1964-1986. Selama tahun 1996/1997, rata-rata terjadi 2,75 kejadian bencana alam per hari di Indonesia.

Selain menimbulkan risiko bencana, kondisi geografis Indonesia juga menyimpan potensi kekayaan alam seperti minyak, gas alam, emas, tembaga, dan sebagainya, yang menarik begitu banyak investor asing dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi lain yang lebih parah karena bukan saja kondisi rakyat Indonesia tak beranjak dari kemiskinan tapi juga memunculkan bencana lainnya. Hutan dibabat habis sehingga menimbulkan banjir dan longsor, limbah industri pertambangan mencemarkan lingkungan hidup, dan bencana-bencana lainnya yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Selain bencana alam, kita dihadapkan pada persoalan krusial lainnya seperti kesehatan dan kemiskinan masyarakat: pencegahan dan pemberantasan penyakit, masalah air dan sanitasi, kesejahteraan masyarakat rentan di daerah tertinggal, dan sebagainya.

Selain bencana alam, kita diharapkan pada persoalan krusial lainnya seperti kesehatan dan kemiskinan masyarakat. Pada ikut ambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, masalah air dan sanitasi, kesejahteraan masyarakat rentan di daerah tertinggal, dan sebagainya.

Selama ini, apabila bencana terjadi, kita selalu seperti tidak siap untuk melakukan tindakan penanggulangan. Hampir tidak ada sistem deteksi dini terhadap bencana yang bisa diakses langsung masyarakat. Tidak ada sistem yang membuat masyarakat yang terlatih menghadapi bencana. Kita hanya bergantung pada respon pemerintah yang seringkali tidak siap mengambil langkah yang taktis dan strategis.

Lalu, apa yang dapat kita lakukan karena kita tidak dapat mengelak kenyataan ini?

Tidak ada kata terlambat. Sudah saatnya kita bersama-sama pemerintah, memiliki kesadaran akan ancaman bencana yang selalu mengintai kita. Bukan hanya bergerak ketika bencana itu datang tapi juga mengantisipasi kemungkinan bencana yang dapat datang kapan saja. Sudah saatnya masyarakat sendiri, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana, memiliki kesadaran kesiapsiagaan terhadap bencana. Masyarakat dapat berpartisipasi dan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) di seluruh Indonesia, pemerintah daerah (termasuk di tingkat desa/kelurahan), serta lembaga-lembaga dalam hal kesiapsiagaan bencana.

Sejak 1 September 2003, PMI bekerja sama dengan Palang Merah Denmark atau *Danish Red Cross* (DRC) mengimplementasikan Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM) atau *Community Based Disaster Preparedness (CBDP)*. Program ini merupakan program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi. Komunitas siaga bencana juga diharapkan dapat menjadi sistem deteksi dini. Jika bencana alam terjadi, mereka telah mengenali dan bisa melakukan tindakan untuk mengurangi dampak bencana.

Maksud penerbitan buku panduan ini adalah sebagai salah satu upaya mengintensifkan program tersebut sehingga dapat mencapai tujuannya. Buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen bencana. Buku ini juga sebagai bahan referensi dalam pelatihan, serta penyediaan peralatan standar operasional. Bagi PMI sendiri, buku ini penting sebagai tekad dan upaya mewujudkan visi PMI, yakni mampu menyediakan pelayanan kepalangmerahan yang efektif dan tepat waktu, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan, dalam semangat kenetralan dan kemandirian.

Penerbitan buku ini layak disambut gembira. Saya berharap buku ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi para kader PMI dan masyarakat pada umumnya. Dan saya berharap upaya menumbuhkan kesadaran kesiapsiagaan bencana tak putus karenanya dan terus dilakukan, agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2007
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal

Iyang D. Sukandar

Bab I

Pengantar KBBM

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan apa itu KBBM?
- Menyebutkan untuk siapa Program KBBM?
- Menjelaskan apa tujuan KBBM?
- Menjelaskan mengapa KBBM sangat relevan bagi masyarakat yang rentan terhadap bencana?
- Menjelaskan di mana KBBM dapat dilaksanakan?
- Menjelaskan apa ruang lingkup Program KBBM?

Apa itu KBBM?

Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM) atau *Community Based Disaster Preparedness (CBDP)* adalah program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

Program KBBM bersifat partisipatif dan merupakan pendekatan lintas-sektoral melalui langkah-langkah mitigasi yang diarahkan pada pengurangan kerentanan fisik, lingkungan, kesehatan dan sosial-ekonomi, serta sebab-sebab yang tidak terduga lainnya.

Program KBBM berupaya menurunkan kerentanan individu, keluarga, dan masyarakat terhadap dampak bencana melalui pemberian informasi serta tentang manajemen bencana, khususnya upaya-upaya kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko serta tanggap darurat bencana.

Program KBBM menggunakan cara-cara yang relatif sederhana dan mudah dilaksanakan. Masyarakat di kalangan bawah sekalipun dapat melakukan

langkah-langkah tepat untuk mengurangi kerentanan dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana.

KBBM melakukan upaya-upaya penerahan semua potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat untuk bekerja sama dan bergotong royong melindungi kehidupan dan mata pencaharian mereka. Program KBBM dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga bila terjadi bencana mereka dapat menolong atau menyelamatkan diri sendiri, keluarga, serta warga masyarakat lainnya.

Strategi dasar Program KBBM adalah peng-



Foto 1.1. Kegiatan Pertemuan Rutin KBBM di Selayang Pandang – Pesisir Selatan.

organisasian dan pelatihan. Dengan membentuk dan memberikan pelatihan kepada Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat). Tim Sibat diharapkan mampu menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan program KBBM. Mereka diharapkan mampu menggerakkan masyarakat di lingkungannya untuk berpartisipasi penuh.

Perencanaan Program KBBM dilaksanakan melalui pendekatan *bottom-up* (dari bawah ke atas). Masyarakat yang paling rentan berpartisipasi dalam menentukan kegiatan-kegiatan pencegahan, upaya pengurangan dampak bencana dan penanggulangannya. Rencana disusun berdasarkan apa yang harus dilakukan, urutan prioritasnya, dan bagaimana cara melakukan pengurangan risiko bendananya (mitigasi).

Elemen kunci lainnya dari penerapan upaya mitigasi didasarkan pada kebutuhan mendesak yang telah diidentifikasi oleh masing-masing warga masyarakat. Seluruh warga dikerahkan dalam satu jejaring agar dapat saling membantu satu sama lain. Upaya ini diarahkan pada perubahan tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan (PST) serta meningkatnya kapasitas masyarakat yang rentan terhadap risiko bencana.

Program KBBM hanya mungkin terlaksana jika ada kemitraan dengan pemerintah setempat, mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga propinsi, yang memberikan dukungan dana maupun bantuan teknis. Warga sendiri sebagai penerima manfaat memberikan kontribusi berupa tenaga, material, dan sebagian dana. Kemitraan yang kuat antara PMI, pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan perencanaan manajemen bencana jangka panjang.

Untuk Siapa Program KBBM?

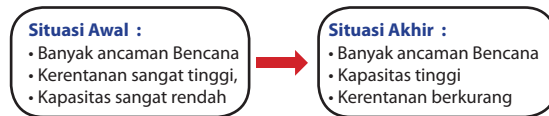
- Seluruh warga masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan dan miskin di wilayah rawan bencana.

Apa Tujuan KBBM?

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko/dampak bencana yang terjadi di lingkungannya.
- Meningkatkan kapasitas PMI dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terkoordinasi kepada para korban bencana.

Mengapa KBBM?

- Manajemen penanggulangan bencana sampai dengan kurun waktu terakhir ini hanya terfokus pada upaya bantuan, penyelamatan masyarakat yang terkena dampak bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang tentu saja memerlukan biaya sangat mahal. Cara-cara ini terus-menerus dilakukan tanpa adanya langkah-langkah bagaimana mengurangi dampak bencana dan tingkat risiko kerusakan. Dengan Program KBBM, PMI melakukan langkah-langkah pemberdayaan kapasitas masyarakat agar mampu mengurangi tingkat risiko dan dampak bencana yang ditimbulkan.
- KBBM sangat relevan. Melalui pengembangan PST dalam manajemen bencana dan tanggap darurat bencana, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dapat berperan langsung sebagai penolong terdekat dan tercepat bagi keluarga maupun warga masyarakat lainnya di lokasi tersebut.
- PMI melatih TSR (Tenaga Sukarela) sebagai Tim Sibat yang diharapkan dapat menggerakkan dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko/dampak bencana.



Gambar 1.1. Perubahan Kondisi Masyarakat yang akan dicapai melalui Program KBBM

- Dengan pengetahuan dan kesadaran akan bahaya, kerentanan, kapasitas dan upaya-upaya mitigasi yang dibekalkan kepadanya, masyarakat diharapkan mampu membuat peta rawan bencana di wilayahnya. Sehingga masyarakat dapat mengenali jalur-jalur evakuasi penyelamatan yang aman.
- Masyarakat yang rentan bencana perlu diberdayakan agar bisa melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko/dampak bencana secara mandiri.
- Melalui Program KBBM, masyarakat di wilayah rawan bencana dapat mengurangi dampak bencana, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan produktivitas kerja yang akan berdampak pada meningkatnya kondisi kehidupan/kesejahteraan.

Di Mana KBBM Dilaksanakan?

KBBM sangat tepat dilaksanakan di desa/kelurahan atau daerah rawan bencana yang masyarakatnya memiliki tingkat kerentanan tinggi. Selain itu, mereka juga mudah untuk dimotivasi dalam melakukan kegiatan.

Apa Ruang Lingkup KBBM?

Program KBBM mencakup:

- Kesehatan: tindakan pencegahan dan upaya mitigasi yang berkaitan dengan penyelamatan jiwa manusia. Sehingga setiap individu memperoleh akses pelayanan kesehatan, karena dampak bencana biasanya menimbulkan pe-

nyakit epidemik, polusi, kekurangan gizi, dan lain-lain.

- Di desa/kelurahan di mana wabah malaria dan demam berdarah berjangkit dilakukan pemberantasan nyamuk. Cara yang digunakan misalnya dengan *larvasiding*, yakni menebar ikan nila, sebagai pemakan jentik-jentik nyamuk. Dilakukan juga kelambunisasi, yaitu penyuluhan akan pentingnya menggunakan kelambu pada saat tidur agar terhindar dari gigitan nyamuk. Kerja bakti 3 M (Menguras, Menutup dan Menimbun) merupakan hal yang rutin yang dilaksanakan bukan hanya saja memberantas nyamuk tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan secara umum.



Foto 1.2 Kegiatan Pemetaan – KBBM di Desa Suoh, Lampung Barat

- Sosial dan Ekonomi: tindakan pencegahan dan upaya mitigasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan keselamatan sumber-sumber ekonomi/kehidupan manusia. Sehingga membantu setiap individu dan kelompok masyarakat agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial dan tidak kehilangan sumber-sumber penghasilan akibat terjadinya bencana. Di desa-desa yang sering mengalami banjir, perlu disediakan peralatan penyelamatan, misalnya katinting atau perahu kecil. Dengan alat penyelamatan ini jiwa dan harta benda diharapkan dapat diselamatkan saat bencana banjir terjadi.

Pada masa "damai" ketika bencana tidak terjadi perahu bisa dijadikan alat transportasi yang untuk penggalangan dana kegiatan kesiapsiagaan bencana.

- Lingkungan: tindakan pencegahan dan upaya mitigasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan bencana. PMI Cabang Lampung Barat mencoba mengatasi ancaman tanah longsor di Desa Suoh dengan menanam lereng dengan bambu dan pohon-pohon perdu.

Apa Manfaat Program KBBM?

Manfaat Program KBBM sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam manajemen bencana dan tanggap darurat bencana. Tim Sibat mengorganisasikan dan memberdayakan sumber daya masyarakat setempat untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan serta mensosialisasikan cara-cara hidup yang bersih dan sehat.
- Melibatkan sistem administrasi pemerintahan desa/kelurahan dalam menyusun konsep pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan dampak bencana.
- Konsep KBBM sangat mudah dan dapat diterapkan di lapangan, sehingga dapat dijadikan model pengembangan manajemen bencana di lingkungan PMI, pemerintah, maupun lembaga lain yang peduli pada penanganan bencana.
- Upaya mitigasi struktural (fisik) yang dilaksanakan dalam Program KBBM untuk mengurangi tingkat bahaya dan risiko dampak bencana, yang pada akhirnya mengurangi kerentanan dan kemiskinan struktural di masyarakat.

- Terkait dengan masalah kesehatan, KBBM memberdayakan kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya pemeliharaan kesehatan dasar atau *Primary Health Care* (PHC) dan pola hidup sehat.

- Citra PMI semakin positif karena Program KBBM tidak hanya program monumental dalam jangka pendek, namun juga memperhatikan aspek jangka panjang dan keberlanjutannya di masyarakat. KBBM adalah program yang menjalin kemitraan positif, semangat kebersamaan, dan saling dukung satu dengan lainnya.



Foto 1.3. Kegiatan Sosialisasi Jalur Evakuasi dan Prosedur Tanggap Darurat bagi masyarakat – Program KBBM di Laelo - Wajo.

Bab II

Strategi dan Pendekatan Program KBBM

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Memahami bagaimana posisi Program KBBM dalam Manajemen Penanganan Bencana.
- Memahami prinsip dasar yang diperlukan dalam menjalankan Program KBBM.
- Menjelaskan strategi pelaksanaan Program KBBM.
- Menjelaskan bagaimana pendekatan dalam pelaksanaan Program KBBM.
- Menggambarkan arus proses pelaksanaan Program KBBM.

Bagaimana Posisi Program KBBM dalam Manajemen Penanganan Bencana?

Program KBBM tidaklah berdiri sendiri, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kesiapsiagaan dan penanggulangan Bencana secara keseluruhan. Program KBBM adalah bagian dari kesiapsiagaan dan merupakan salah satu komponen yang memberi andil besar dalam manajemen penanganan bencana.

Respon terhadap bencana telah lama dilakukan masyarakat secara reaktif dan tradisional. Biasanya melalui penyediaan pelayanan darurat seperti pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR), pendistribusian barang bantuan (*relief*), pelayanan kesehatan dan dukungan psikologi sosial, serta penampungan darurat atau evakuasi.

Kejadian pada masa lalu, yang menggabungkan respon dengan pendistribusian bantuan bencana, dapat berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari luar.

Operasi tanggap darurat memiliki peranan

penting dalam tahapan manajemen bencana. Saat ini diakui bahwa kegiatan tanggap darurat merupakan bentuk pelayanan yang relevan dan keberadaannya tetap diperlukan saat terjadi bencana. Namun upaya-upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko/dampak bencana harus pula dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat tanggap darurat bencana.

Meskipun tanggap darurat tetap diperlukan keberadaannya, namun Program KBBM merupakan solusi tepat untuk mengurangi kerentanan struktural masyarakat. Masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana harus ditingkatkan kapasitasnya. Mereka tidak boleh hanya pasrah terhadap nasib dan takdir. Mereka harus didorong agar berupaya dengan kapasitas yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian, mereka mampu mengurangi kerentanan dan melakukan upaya-upaya proaktif untuk meminimalisasi bahaya dan risiko bencana melalui upaya-upaya pencegahan, mitigasi dan penanggulangan.

Pencegahan, mitigasi dan penanggulangan seyogyanya lebih difokuskan pada pemberdayaan



Gambar 2.1. Siklus Penanganan Bencana

dan penyadaran daripada solusi pembangunan fisik semata. Perencanaannya tidak diarahkan semata pada upaya solusi teknologi, namun lebih menekankan pada pendekatan proaktif bukan reaktif, lebih bersifat internal bukan eksternal, dan menggunakan pendekatan *bottom-up*, bukan *top-down*.

Potensi ancaman tidak datang hanya dari luar, namun juga dari sistem sosial. Mengurangi tingkat ancaman/bahaya dan risiko bencana harus menjadi bagian dari pertimbangan pembangunan kawasan wilayah.

Dengan perspektif penanganan bencana ini, Program KBBM menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat korban bencana hanya pasrah, pasif, dan sangat tergantung pada pemberi bantuan, sekarang mereka dapat lebih aktif di dalam keseluruhan proses penanganan bencana, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.



Foto 2.1. Kegiatan VCA – KBBM di Sanggi, Lampung Selatan

Apa Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Program KBBM?

Secara teoritis, Program KBBM merupakan konsep yang memayungi pendekatan partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan

partisipatif lebih efektif dan berdampak positif dalam menggerakkan masyarakat lokal untuk pengembangan kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Masyarakat akan termotivasi untuk belajar mengorganisasikan diri sebagai pelaksana kegiatan tanggap darurat bencana.

Pada masa "damai" masyarakat tergerak untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas, pendidikan, pengorganisasian, pencerahan masyarakat lainnya. Masyarakat harus ikut serta dalam proses perencanaan kegiatan KBBM. Upaya-upaya tersebut dipadukan dengan peranan masyarakat dalam manajemen pasca bencana seperti pemulihan dan rehabilitasi (mengembalikan seperti keadaan semula), rekonstruksi (pembangunan kembali), pengembangan, pencegahan, mitigasi, serta penanggulangan bencana.

Hasil Program KBBM di berbagai negara selama ini menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan masyarakat lainnya memberikan manfaat antara lain:

- Penilaian dan apresiasi yang lebih baik dalam hal pengenalan situasi dan kondisi masyarakat serta penilaian terhadap tingkat bahaya, risiko, dan sumber daya setempat.
- Menggambarkan desa/kelurahan kegiatan mitigasi dan rencana kerja yang lebih menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
- Manajemen sumber daya masyarakat menjadi lebih baik dalam memberikan kontribusi dalam penyediaan dana, tenaga, dan material.
- Meningkatkan kapasitas individu di antara warga masyarakat.
- Mengembangkan kapasitas kerja masyarakat.
- Hubungan kemitraan yang lebih baik antara masyarakat dan PMI.
- Meningkatkan koordinasi, komunikasi, kerja sama, dan kemitraan antara masyarakat, PMI,



Foto 2.2. Hubungan kemitraan dalam Program KBBM antara PMI Daerah Lampung dengan Pemda Provinsi Lampung.

pemerintah dan institusi atau organisasi non-pemerintah (Ornop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- Mempersiapkan masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana dengan lebih baik.

Prinsip-prinsip Program KBBM

Misi utama Program KBBM adalah untuk meningkatkan kapasitas PMI dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Karenanya, dalam menjalankan program KBBM, ada prinsip-prinsip utama yang tercermin dalam akronim "KAPASITAS", yang dapat dijelaskan berikut ini.

• Kemitraan

Program KBBM hanya akan berhasil optimal bila terjalin kemitraan dan partisipasi yang tinggi dari semua komponen masyarakat, pemerintah, LSM, maupun institusi lainnya. Kemitraan tidak hanya diarahkan pada penyediaan dana, material, dan tenaga, namun juga dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya, termasuk terhadap keberlangsungan program. Memperkuat kemitraan berarti juga membina komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan berbagai disiplin

dan profesi terkait seperti ahli meteorologi, pekerja pengembangan masyarakat, ekonom, ahli biologi, tenaga kesehatan, ahli geologi, pekerja sosial, insinyur, konsultan, guru dan sebagainya.

- **Advokasi**

Program KBBM sangat memerlukan upaya advokasi, sosialisasi, dan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan bencana. Advokasi dari internal PMI yang meliputi staf, pengurus, relawan dan para pelatih, maupun pihak-pihak eksternal antara lain pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, LSM, badan, dinas dan instansi lainnya termasuk masyarakat umum, sangat menentukan pelaksanaan program maupun keberlangsungannya. Upaya advokasi ini diharapkan dapat membina komunikasi dan kerja sama yang kuat dalam pencapaian tujuan program.

- **Pemberdayaan**

Program KBBM dilaksanakan dengan memberdayakan kapasitas masyarakat. Tumbuhnya ketidakpastian situasi lingkungan, fisik, sosial, ekonomi, dan politik menyebabkan warga menjadi sangat rentan terhadap bahaya dan dampak bencana. Hal ini memerlukan sebuah upaya agar kapasitas masyarakat dapat diberdayakan melalui pengorganisasian dan penerahan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penyadaran sosial-ekonomi dan lingkungan, pendidikan atau pelatihan, dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pembuatan kebijakan dan Program KBBM diperlukan agar masyarakat memiliki akses untuk mengontrol masukan-masukan (*input*), proses, hasil (*output*) dan keberlangsungan program.

- **Analisis Risiko dan Kerentanan**

Masyarakat harus diajak mengenali kondisi lingkungannya yang rawan bencana serta kerentanan

dan kapasitasnya. Setelah itu, mereka diajak melakukan analisis secara internal dan eksternal. Mengapa daerahnya rawan bencana? Apakah ada faktor-faktor internal yang memicu kerawanan tersebut? Apakah ada upaya-upaya untuk mengatasinya? Dan mengapa mereka menjadi sangat rentan terhadap bencana?

Hasil analisis tersebut diharapkan mampu membuat masyarakat sadar bahwa terdapat hal-hal yang dapat memicu kerentanan, baik karena perbuatan mereka sendiri atau lebih disebabkan faktor eksternal. Mereka sadar bahwa mereka seharusnya dapat mengatasi kerentanan tersebut dengan melakukan upaya pengurangan tingkat bahaya, risiko dan mitigasi dampak bencana.

Kesadaran masyarakat merupakan prinsip yang menunjang keberhasilan Program KBBM. Program KBBM harus mampu membuat masyarakat sadar bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana. Mereka rentan karena mereka terus-menerus menerima dampak yang berbahaya dari bencana, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengurangi kerentanan tersebut kecuali mereka sendiri.

Dari kesadaran dan kemampuan analisis tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai upaya untuk mengurangi tingkat bahaya dan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Kemampuan analisis ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu melakukan cara-cara penyelamatan, pertolongan, dan penanggulangan bencana secara mandiri.

- **Swadaya**

Program KBBM menggunakan pendekatan *bottom-up* (dari bawah ke atas atau partisipasi masyarakat), bukan *top-down* (dari atas ke bawah). Keberhasilan pelaksanaannya sangat bertumpu pada swadaya masyarakat. Dalam artian,

menggunakan sumber-sumber daya, potensi, dan komponen-komponen yang dimiliki masyarakat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, masyarakat diberikan peranan utama. Dalam program mitigasi misalnya, memanfaatkan tenaga, sumber-sumber material, infrastruktur, serta fasilitas yang ada dalam masyarakat. Peranan pihak eksternal hanya memfasilitasi dan menambahkan sumber-sumber yang belum ada, yang kelak sepenuhnya diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.

- **Integrasi**

Program KBBM memadukan model, instrumen, metode, pendekatan, dan strategi KBBM dengan PKS yang dimiliki masyarakat. Sejak lama masyarakat memiliki cara-cara sendiri dalam merespon bencana seperti pemahaman, ramalan, peringatan, maupun cara-cara tradisional lainnya. Banyak yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, bila tidak disebut takhayul. Program KBBM memanfaatkan cara-cara masyarakat, yang secara rasional dapat digunakan, untuk memitigasi bencana. Program KBBM menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek, namun subjek utama.

Promosi tentang pentingnya aplikasi secara konsisten Tujuh Prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengetuk hati pihak-pihak terkait agar sadar dan memahami pentingnya Program KBBM serta menyatakan komitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan yang signifikan.

Integrasi juga dimaksudkan bahwa Program KBBM dipadukan ke dalam rencana pembangunan Pemerintah Daerah (Pemda) serta terlembagakan dalam pola dan tatanan kehidupan masyarakat setempat, termasuk dalam pembangunan dan sikap yang sadar terhadap dampak bencana.

- **Terfokus**

Program KBBM harus terfokus pada pemenuhan kebutuhan utama masyarakat serta benar-benar memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, Program KBBM memerlukan penyusunan sistem, prosedur dan pedoman operasional. Keterlibatan penuh masyarakat secara fisik, mental, dan emosional juga diperlukan. Penyusunan dimaksudkan untuk memastikan efisiensi dan pemanfaatan sumber-sumber daya seperti dana, waktu, material, informasi, dan teknologi yang benar-benar terfokus pada tujuan riil.



Foto 2.3. Masyarakat Desa Suoh – Lampung Barat terlibat aktif dalam kegiatan transect mapping.

- **Aksi nyata**

Program KBBM mengarahkan keinginan dan komitmen semua pihak, baik PMI, masyarakat, maupun pemerintah ke dalam aksi nyata yang lebih nyata, yang dapat mengoperasikan KBBM pada berbagai tingkatan. Pemerintah, institusi, dan organisasi di level propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, maupun kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan aksi nyata sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- **Sustainability (Keberlanjutan)**

Program KBBM tidak hanya terfokus pada kebutuhan jangka pendek, namun harus berorientasi jangka panjang. Hasil-hasil yang dicapai, semua elemen yang mendukung, serta strategi, pendekatan,

model, instrumen dan metode yang digunakan harus dilembagakan dan bisa dipakai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, mereka dapat menjaga, merawat, dan mengembangkan pelaksanaan Program KBBM.

Keberlanjutan juga berarti bahwa masyarakat akhirnya dapat mengambil alih secara mandiri tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana tanpa bergantung pada pihak donor maupun fasilitator dari luar.

Bagaimana Strategi Melaksanakan Program KBBM?

- **Strategi Advokasi dan Promosi Perilaku Sadar Bencana**

Program KBBM memerlukan dukungan semua pihak: masyarakat, pemerintah setempat, PMI, lembaga/dinas, instansi dan mitra lainnya. Dukungan ini dapat diperoleh bila diawali dengan advokasi dan promosi perilaku sadar bencana secara komprehensif kepada semua pihak.

- **Strategi Pengembangan Kapasitas**

Program KBBM adalah inisiatif PMI dengan memanfaatkan struktur organisasi yang ada. Pengembangan kapasitas terhadap para staf dan relawan PMI di segala tingkatan sangat penting guna mencapai tujuan program serta kesinambungan jangka panjang. Pengembangan kapasitas bagi kelompok masyarakat sendiri sama pentingnya, mengingat masyarakatlah yang pertama kali menghadapi situasi bencana di lingkungan mereka. Pengembangan kapasitas akan dilaksanakan dengan:

- Membangkitkan kesadaran pentingnya KBBM (termasuk pendidikan tentang kesehatan, pertolongan pertama dan lain-lain).
- Membangun jaringan kerja di antara relawan PMI yang keanggotaannya juga berasal dari masyarakat.
- Mendukung pengembangan kapasitas PMI

dalam manajemen bencana di setiap tingkatan melalui pelatihan dan pengalaman selama proses pelaksanaan program.

- **Strategi Partisipatif**

Partisipasi aktif staf dan relawan PMI di segala tingkatan sangat penting bagi keberhasilan program. Staf PMI akan senantiasa ikut dalam setiap tahap pelaksanaan program. Termasuk pada saar perencanaan (mendesain), pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi. Keterbukaan dan transparansi di segala aspek manajemen harus diterapkan guna menciptakan iklim kesetaraan dan citra positif pada semua pihak yang terkait.

Keikutsertaan warga masyarakat sama pentingnya. Adalah perlu untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di tingkat paling bawah agar dapat mendukung setiap inisiatif kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Perencanaan *bottom-up* merupakan sarana untuk melibatkan warga masyarakat agar berpartisipasi secara langsung. Partisipasi warga masyarakat dalam mengidentifikasi risiko dan tingkat prioritas diperlukan untuk mendesain kegiatan yang relevan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan mereka.

- **Strategi Penyadaran Kesetaraan Gender**

Pada tahap persiapan telah memberikan perhatian khusus pada isu kesetaraan gender serta strategi untuk mendesainnya. Program KBBM senantiasa memastikan bahwa kaum perempuan bukan hanya pihak yang menerima manfaat langsung dari program namun juga punya kesempatan terlibat dan berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, PMI mengembangkan kebijakan kesetaraan gender.

Kecenderungan tenaga staf program yang didominasi kaum pria dibatasi dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk menjadi tenaga staf Program KBBM. Dalam

rekrutmen Tim Sibat, kaum perempuan juga mendapat-kan kesempatan. Kaum perempuan akan menjadi pondasi kuat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di tingkat desa. Konsep kesetaraan gender akan menjadi bagian yang menyatu dalam kegiatan pelatihan dan peningkatan kesadaran di setiap tingkatan. Perkumpulan perempuan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-goyanya dilibatkan dalam Program KBBM.

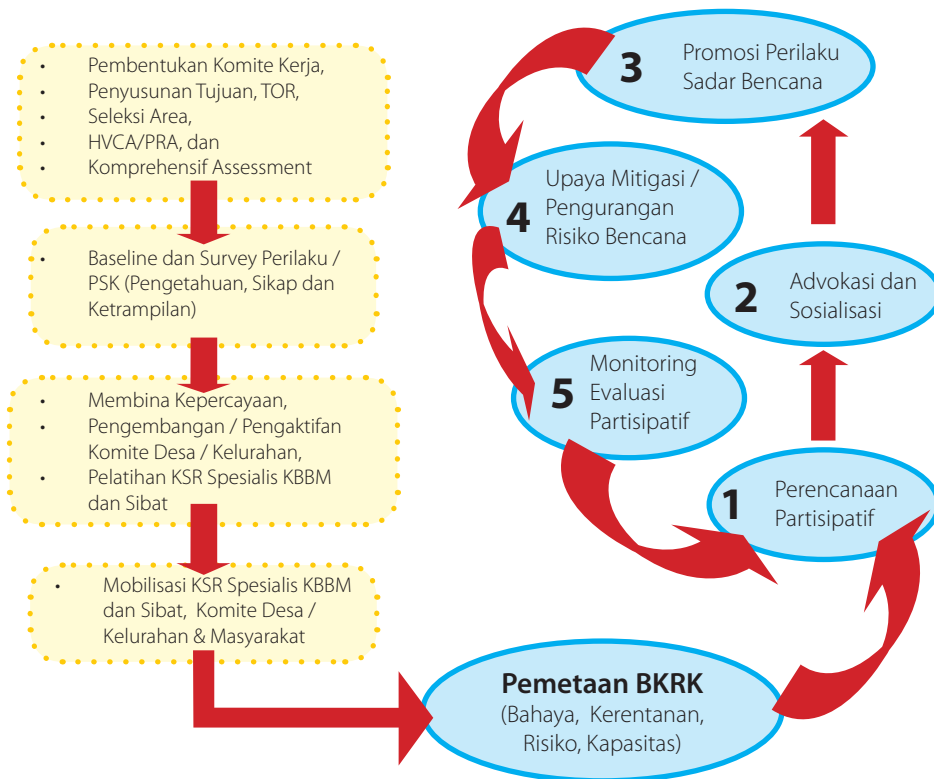
- **Strategi Penayadaran Sosial**

Program KBBM memberikan prioritas tertinggi pada pengembangan kapasitas masyarakat. PMI menyadari perlunya memberikan perhatian khusus

terhadap lingkungan sosial di mana Program KBBM akan dilaksanakan. Meskipun bukan tugas utama PMI menjadi mediator dalam pertikaian setempat dan/atau dalam sebuah konflik, namun PMI tetap perlu memberikan perhatian dan terlibat jika Program KBBM dilaksanakan di wilayah-wilayah yang dilanda ketegangan sosial.

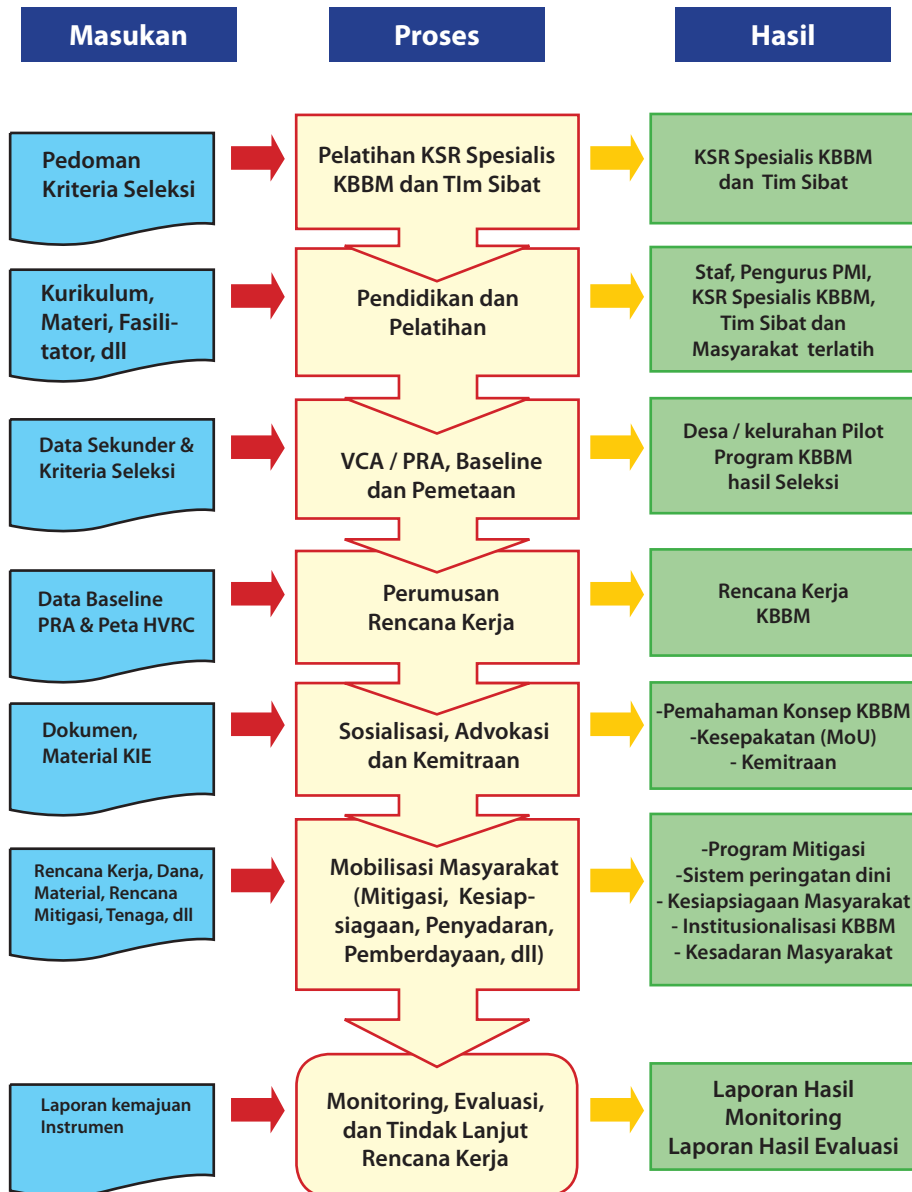
Langkah pertama adalah membuang asumsi bahwa pencegahan dan meminimalkan ketegangan sosial merupakan program khusus dan terpisah. Jika dilaksanakan dengan cara yang benar, Program KBBM justru akan mempererat hubungan sosial, yang berdampak pada menurunnya risiko kete-

Tahapan Pelaksanaan Program KBBM



Gambar 2.2. Tahapan Pelaksanaan Program KBBM

Alur Proses Pelaksanaan Program KBBM



Gambar 2.3. Alur Proses Pelaksanaan Program KBBM

gangan dan potensi konflik. Pada saat bersamaan, program akan mengurangi risiko yang lebih spesifik melalui internalisasi aspek-aspek seperti kesadaran dini, analisis sosial, transparansi dan meningkatnya mekanisme pemecahan masalah.

Kedua, perangkat (*tools*) Program KBBM yang diusulkan seperti VCA (*Vulnerability and Capacity Assessment*) atau Pengkajian Kerentanan dan Kapasitas, dan PRA (*Participatory Rural Assessment*) atau Pengkajian Pedesaan Partisipatif, serta pengembangan kesetaraan gender dapat digunakan pada saat bersamaan untuk analisis sosial.

Alasan dilaksanakannya kegiatan analisis sosial antara lain untuk:

- Mengembangkan kemampuan PMI dalam analisa sosial dan mengembangkan *tools*-nya.
- Memastikan Program KBBM terlepas dari konflik, terutama setelah intervensinya (*do no harm*).
- Memastikan PMI dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*well function*) dan memberikan pelayanan terbaik selama masa-masa ketegangan sosial atau darurat.

Akhirnya, membantu PMI menciptakan citra netral dan tidak berpihak serta pelayanan pada masyarakat luas secara lebih baik.

• **Strategi Kerja Sama Multi-sektoral**

Akibat yang ditimbulkan oleh bencana bisa sangat besar dan mempengaruhi kehidupan, baik dalam hal kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Karena itu, Program KBBM mensyaratkan adanya kerja sama multi-sektoral di segala tingkatan. Koordinasi dan kerja sama di dalam Divisi Penanganan Bencana dan antar divisi di setiap tingkatan PMI sangat disyaratkan, termasuk koordinasi dengan Pemda serta organisasi-organisasi lainnya. Selain itu, perlu menetapkan mekanisme koordinasi resmi seperti Komite Manajemen Program yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama multi-sektoral.

• **Strategi Penerapan yang Bertahap**

Program KBBM diterapkan secara bertahap. Proses tersebut memungkinkan PMI menata sistem dan struktur manajemen yang baru serta belajar dari pengalaman dua tahun pertama persiapan sebelum kemudian memperbesar jumlah kelompok masyarakat sasaran.

Bagaimana Pendekatan Program KBBM?

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Program KBBM mencakup:

- Sosialisasi dan advokasi
- Kemitraan dengan Pemda dan institusi lain
- Pembentukan Tim Satgas dan Tim Sibat
- Pendidikan dan pelatihan
- VCA/PRA dan Pemetaan
- Perencanaan Partisipatif
- Promosi Perilaku Sadar Bencana
- Memobilisasi/Menggerakkan Masyarakat
- Upaya-upaya Mitigasi/Pengurangan Risiko Bencana
- Memastikan adanya keberlangsungan

Masing-masing pendekatan tersebut akan dibahas secara rinci pada bagian-bagian berikutnya.

Bagaimana Alur Pelaksanaan Program KBBM?

Sejak awal, program ini dikembangkan agar masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dalam mengurangi tingkat risiko dan dampak bencana yang terjadi di wilayahnya.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan. Tahapan utama pelaksanaan Program KBBM digambarkan dalam alur proses pada Gambar 2.3.

Melaksanakan Program KBBM berarti mengedepankan semua proses yang mengarah

pada pelaksanaan sedikitnya satu upaya mitigasi. Upaya mitigasi merupakan konsep yang luas untuk mendorong masyarakat melaksanakan aksi nyata yang berdampak pada penurunan tingkat risiko dan dampak bencana.

Pada jangka panjang, Program KBBM diharapkan mampu menjadi model pembangunan daerah yang memperhatikan aspek-aspek bahaya dan risiko bencana. Pada saat yang sama, Peta Bahaya, Kerentanan Risiko dan Kapasitas (BKRK) diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa/kelurahan, termasuk dalam mempertimbangkan penggunaan lahan. Dengan demikian, penggunaan lahan di daerah yang sangat rentan dan rawan bencana dapat dihindari.

Program KBBM harus mendapatkan dukungan semua pihak. Dengan demikian Program KBBM harus dipadukan secara multi-sektoral, dan multi-disipliner.

Sebagai proses pengembangan, Program KBBM memiliki konteks dan kaitan yang luas. Program KBBM tidak hanya memusatkan perhatian pada masyarakat yang rentan terhadap situasi bahaya atau kondisi buruk akibat bencana, namun juga pada isu-isu pengembangan seperti kesehatan keluarga, penyuluhan kesehatan, pertolongan pertama, keselamatan dan kesejahteraan.

Warga yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat akan direkrut sebagai Tim Sibat. Merekalah yang akan menggerakkan warga lainnya dalam semua kegiatan Program KBBM. Termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, upaya mitigasi, penyadaran masyarakat terhadap bahaya bencana, dan peningkatan kemampuan penanggulangan bencana.

Bab III

Kriteria dan Seleksi Desa/Kelurahan Mitra

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan kriteria wilayah Program KBBM.
- Menyeleksi area Program KBBM berdasarkan kriteria yang telah ada.

Bagaimana Kriteria Desa/Kelurahan Mitra?

Program KBBM sangat tepat untuk desa/kelurahan atau daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat desa/kelurahan yang tinggal di area rawan bencana, yakni desa/kelurahan yang rentan terhadap risiko/bahaya bencana alam atau lingkungan, seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, erosi, gelombang pasang, tsunami dan sebagainya yang secara langsung maupun

tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat setempat.

2. Masyarakat pedesaan/kelurahan dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap:
 - Masalah kesehatan dan penyakit yang terkait dengan bencana.
 - Pendapatan masyarakat sangat rendah dan tanpa surplus.
 - Hilangnya sumber penghasilan penduduk akibat bencana, seperti hanyutnya peralatan nelayan, terendamnya sawah dan ladang, dan lain-lain.
 - Banyaknya masyarakat yang tergolong miskin dan sangat miskin.
 - Kurangnya tingkat PSK tentang upaya-upaya kesiapsiagaan/pengurangan risiko bencana.
 - Kelangkaan sumber kekayaan alam, seperti pertanian, perikanan, sumber air bersih dan lain-lain.
 - Kondisi air dan sanitasi yang memprihatinkan serta rentan terhadap bahaya dan wabah penyakit.
 - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.



Foto 3.1. Anggota Tim Sibata mengevakuasi warga saat banjir di Kelurahan Laelo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.



Foto 3.2. Kesulitan mendapatkan air bersih di Pekon Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

3. Desa/kelurahan tepat dijadikan sebagai area pelaksanaan Program KBBM jika memenuhi hal-hal antara lain:
 - Pemda, PMI dan masyarakat memiliki komitmen tinggi dan dapat bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan Program KBBM.
 - Masyarakat setempat mudah digerakkan/dimobilisasi untuk upaya-upaya kesiapsiagaan/pengurangan risiko bencana.
 - LSM dan mitra lainnya menunjukkan kemauan untuk terlibat dalam Program KBBM dan terbuka menerima upaya peningkatan maupun perubahan.
 - Lemahnya sistem operasional dalam hal pendistribusian bantuan dan penanggulangan bencana.

Bagaimana Tahap-tahap Seleksi Desa/Kelurahan Mitra?

Proses menyeleksi desa/kelurahan mitra untuk Program KBBM dilakukan melalui beberapa tahap setelah kriteria diputuskan melalui pembahasan yang mendalam oleh PMI Cabang maupun PMI Daerah.

Pemilihan desa/kelurahan mitra untuk Program

KBBM tidaklah semudah memilih daerah mitra untuk program yang sifatnya jangka pendek atau insidental. Suatu desa/kelurahan dipilih sebagai mitra Program KBBM jika memenuhi kriteria dan didukung data-data sekunder, hasil observasi langsung di lapangan, maupun data dari pelaksanaan VCA/PRA.

Tahap-tahap yang harus dilakukan antara lain:

- Pengumpulan data sekunder tentang tingkat kerentanan masyarakat di desa/kelurahan setempat dan tingkat kerawanan terhadap bencana.
- Analisis data sekunder yang mengarah pada pembahasan secara komprehensif tingkat kerentanan masyarakat, tingkat kerawanan bahaya dan risiko, maupun tinjauan antropologis dan karakteristik masyarakat setempat yang memungkinkan pelaksanaan Program KBBM atau tidak.
- Kunjungan dan observasi langsung ke masyarakat. Kunjungan ini digunakan untuk melihat secara nyata kondisi desa/kelurahan setempat dengan menggunakan kriteria dan hasil analisis data sekunder yang telah dikumpulkan sebagai indikator.
- Proses seleksi masyarakat dengan mengkaji secara cermat dan komprehensif hasil kunjungan lapangan dan analisis data sekunder dan mencocokkannya dengan indikator-indikator kriterianya.
- Bila desa/kelurahan tersebut menunjukkan memenuhi kriteria, kita bisa membina pemahaman masyarakat tentang rencana melakukan pengkajian secara cermat di desa/kelurahan tersebut untuk dapat dicalonkan sebagai daerah Program KBBM.
- Membina hubungan baik dengan masyarakat perlu dilakukan sebagai bagian dari cara pendekatan untuk menggali data sebanyak dan seefektif mungkin. Pengambilan data primer dengan teknik wawancara semi-terstruktur kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti

kepala desa/lurah, perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bidan desa dan perwakilan dari masyarakat rentan dapat dilakukan sebelum pengkajian VCA/PRA.

- Melaksanakan VCA/PRA merupakan cara mengumpulkan data riil di masyarakat. Hasil PRA ini digunakan untuk menyusun VCA. Cara-cara bagaimana melaksanakan PRA dapat merujuk pada Buku Panduan VCA/PRA.
- Penetapan desa/kelurahan mitra yang didasarkan atas semua proses pengumpulan data, baik data primer, data sekunder, maupun data VCA/PRA.

Bab IV

Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi (PIMES)

Pengertian PIMES

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan pengertian PIMES.
- Menjelaskan bagaimana siklus PIMES.
- Mengetahui hal-hal yang direfleksikan oleh PIMES.
- Menjelaskan latar belakang dan sejarah PIMES.

Apakah PIMES itu?

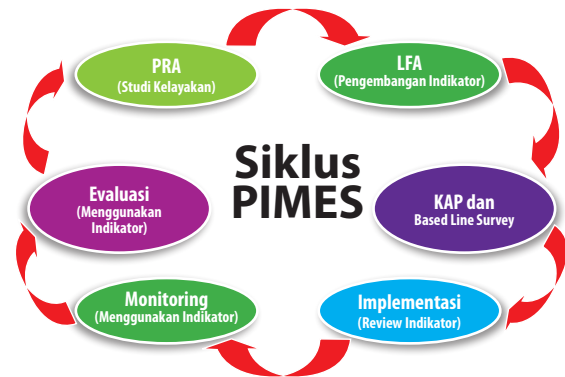
PIMES singkatan dari *Planning, Implementation, Monitoring and Evaluation System* atau Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan secara partisipatif.

PIMES tidak hanya digunakan sebagai konsep dan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, namun juga upaya mengkombinasikan masing-masing tahapan Program KBBM dengan karakteristik sebagai berikut:

- PIMES merupakan alat pembelajaran dan manajemen.
- PIMES menerapkan pendekatan *bottom-up* secara partisipatif.
- PIMES mendorong perbaikan dan pengembangan kegiatan yang dilaksanakan dan manajemennya secara berkelanjutan.

Bagaimana Siklus PIMES?

Proses PIMES tidak terpisahkan dengan peningkatan mutu, dengan menggunakan alur (siklus) seperti berikut:

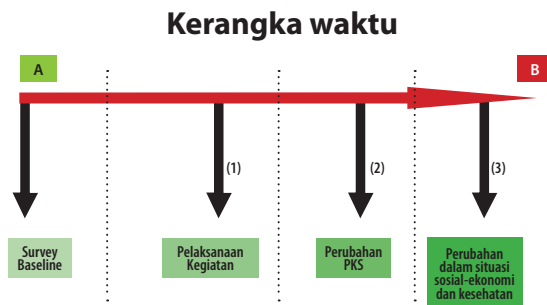


Gambar 4.1. Alur (siklus) kegiatan PIMES sebagai sebuah sistem yang terpadu dan menyeluruh

Hal-hal Apa yang Direfleksikan oleh PIMES?

PIMES juga mengikutsertakan hal-hal baru pada metodologi-metodologi yang telah ada.

- PIMES memberikan gambaran perubahan dari waktu ke waktu.
- PIMES memberikan gambaran perubahan pandangan dan pengertian yang berkembang di wilayah program.
- PIMES memberikan gambaran karakteristik khusus organisasi pelaksana program, dalam hal ini PMI baik di tingkat Daerah maupun Cabang.
- PIMES dapat digunakan baik oleh organisasi donor, manajer, staf pelaksana program, petugas pelayanan kesehatan di desa, maupun masyarakat umum.



• Gambar 4.2. Kerangka waktu PIMES menggambarkan perubahan atau capaian dari waktu ke waktu

Ada 3 (tiga) tahapan Pelaksanaan kegiatan ⇨ Perubahan PSK ⇨ Perubahan-perubahan situasi sosial ekonomi dan kesehatan.

Sasaran dan Kegunaan PIMES

PIMES dipilih sebagai sistem monitoring dan evaluasi karena pelaksanaan PIMES bertujuan:

- Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan, kapasitas manajemen di setiap daerah program dan program pada umumnya.
- Meningkatkan manajemen, pengawasan dan pemantauan, bukan melakukan penelitian (ri-set).

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan sasaran PIMES.
- Memahami kegunaan PIMES.
- Memetik pelajaran dari pelaksanaan PIMES.

PIMES merupakan gabungan perangkat pembelajaran dan manajerial dengan menekankan pada peningkatan pengembangan pembelajaran dan kemampuan (*performance*) para pelaksana program.

Penelitian berskala kecil yang berorientasi pada tindakan langsung dapat dikaitkan dengan PIMES, dengan menggunakan analisis masalah dari data *baseline survey* atau *survey* PSK terbatas atau proses studi sebelum dan sesudah evaluasi untuk memperkaya PIMES.

Kegunaan Utama PIMES

PIMES sebagai sebuah sistem manajemen dan pembelajaran diprioritaskan penggunaannya untuk:

- Memantau tingkat kemajuan dan mutu pelaksanaan program.
- Membuat laporan peningkatan mutu dan apa yang dicapai dalam pelaksanaan program.
- Meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan dan manajemen program.
- Komunikasi dan pelatihan di masyarakat.
- Mengidentifikasi keterlambatan pelaksanaan program.
- Pemecahan masalah dengan segera.

Pelajaran yang Dipetik (*Lesson Learnt*)

Di wilayah-wilayah pelaksanaan Program KBBM, PIMES dipadukan dalam tahapan-tahapannya. PIMES diterapkan sejak Program KBBM digulirkan pada 1 September 2003.

Melalui penerapan PIMES dalam Program KBBM, ditemukan bahwa manfaat PIMES antara lain:

- Kualitas perencanaan kegiatan semakin membaik dari tahun ke tahun.
- Kualitas kegiatan mengalami kemajuan
- Kualitas manajemen program mengalami perbaikan
- Partisipasi dari staf pelaksana program, relawan PMI dan masyarakat terus meningkat



Foto 4.1. Sebagai aktor utama dalam Program KBBM di Tawarroe, Bone, Sulawesi Selatan, masyarakat harus terlibat penuh dalam setiap tahapan

Dalam penilaian pada Program KBBM yang dilakukan konsultan independen pada 2006, dinyatakan bahwa secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang ditargetkan telah terlaksana meskipun terjadi keterlambatan. Melalui PIMES, penyebab keterlambatan tersebut dianalisis sehingga pelaksanaan program selanjutnya mengalami perbaikan.

Ketentuan Cara Kerja dan Konsep Kunci

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan Ketentuan Cara Kerja PIMES.
- Memahami konsep kunci PIMES.
- Memahami persyaratan PIMES.

Ketentuan Cara Kerja

Cara kerja PIMES secara khusus memiliki ketentuan sebagai berikut:

Indikator

Dapat kualitatif atau kuantitatif atau keduanya.

Contoh:

1. Pada tahun 2005, curah hujan di daerah X diperkirakan meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Banjir biasa menimpa Desa Z
2. Contoh: Staf PMI Cabang menyusun rencana kerja menghadapi situasi tersebut. Rencana tersebut disusun secara *bottom-up*, yakni berdasarkan partisipasi penuh masyarakat. Namun penting juga memperhatikan bahwa rencana tersebut :
 - Dapat diukur, dinilai atau dievaluasi.
 - Harus kongkret dan sebaiknya terinci (dinyatakan dengan angka-angka, waktu dan tempat).
 - Harus fungsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
 - Dapat digunakan untuk membuat perbandingan dalam hal perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan monitoring.

Konsep Pokok

Sebuah konsep utama adalah konsep yang menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Indikator yang menggambarkan konsep utama harus dikembangkan dalam program secara tersendiri.

Dalam Program KBBM, konsep pokok digambarkan sebagai berikut

1. Keadilan

Seperti juga pelayanan kesehatan kesiapsiagaan bencana harus dilakukan oleh dan untuk semua orang tanpa diskriminasi. Manfaat dari Program KBBM harus dapat dinikmati masyarakat secara luas.

Contoh:

Pada 2005, melalui Program KBBM air bersih dialirkan ke Pekon Suoh, Lampung Barat. Bak penampungan dibangun di Dusun Suka Mulya dan Talang Mulya. Setiap anggota masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pada 2006 bak penampungan juga dibangun di Dusun Sukajadi 1 dan 2 pada 2006.

2. Kerentanan

Menghadapi ancaman alam, kekerasan dan keadaan yang buruk, tingkat kerentanan meningkat seiring dengan meningkatnya ancaman, kemiskinan dan penggusuran. Dampak tingkat kerentanan ini dapat dikurangi dengan meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara fisik atau material, secara sosial kelembagaan maupun keahlian dan perilakunya.

Contoh:

Sejak dipasangnya kelambu di setiap rumah, jumlah penderita malaria menurun 10% pada tahun 2006.

3. Keberlanjutan

Di masa mendatang, masyarakat bersama PMI

dapat terus melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana. Manfaat upaya ini dapat dirasakan baik oleh masyarakat maupun para pelaksana, tanpa efek yang merusak lingkungan fisik dan psikososial. Upaya ini juga diharapkan terus berlanjut setelah bantuan teknis, manajerial dan keuangan dihapuskan secara bertahap.

Keberlanjutan dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan masyarakat dan lembaga-lembaga mitra dalam memecahkan masalah yang mungkin dihadapi dan memperbaiki lingkungan. Proses partisipasi ini tercermin dalam suasana belajar yang dicirikan oleh kepemimpinan yang memberikan kemudahan, berbagi visi, berbagi pengetahuan, pengembangan sumber daya dan penyelesaian perselisihan.

Contoh:

- 50% dari biaya mitigasi bencana didapat melalui APBD di tingkat Kabupaten atau Kota.
- 70% staf dan relawan PMI mempunyai ke-trampilan pemetaan risiko.
- 80% keluarga di desa/kelurahan X menggunakan kakus sesuai standar kesehatan dan mengonsumsi air bersih setelah program berakhir.
- Pada pertemuan rutin masyarakat, dikumpulkan dana untuk merawat fasilitas air bersih yang telah ada.

4. Keterjangkauan

Pelaksanaan kegiatan Program KBBM mencakup:

- Ketersediaan
- Keterjangkauan
- Digunakan secara efektif dan memadai

Untuk X % dari target populasi

Contoh:

Wabah malaria setiap tahun melanda Desa X. Pada tahun 2004, 50% anak usia sekolah (di bawah 17 tahun) menderita malaria. Selain kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk di setiap dusun, penyulung

luhan bagaimana gejala dan perawatan penyakit malaria termasuk cara pencegahannya dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pertemuan di balai desa mengenai hal ini paling tidak dihadiri 50% kepala keluarga atau perwakilannya. Pada tahun 2005, jumlah penderita malaria di Desa X menurun menjadi 30%.

5. Pengembangan Kapasitas

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan respon bencana dan melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi. Dalam kerangka Palang Merah kemampuan tersebut terdiri dari:

- Material/fisik, merupakan sumber-sumber fisik masyarakat yang dipercaya masih ada dan meningkatkan martabat kehidupan.
- Sosial/organisasi, merupakan mekanisme dukungan sosial yang tersedia di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan saat waktu-waktu krisis, serta ketrampilan dan sikap yang membuat seseorang mampu memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan menurunkan jumlah korban.

Contoh:

- 100% keluarga yang diwawancarai di Desa X pada tahun 2005 telah melakukan 3M di rumah sesuai penyuluhan pencegahan malaria.
- 80% keluarga yang diwawancarai di Desa X pada tahun 2005 memberikan jawaban yang positif tentang kesiapsiagaan bencana.

Aspek-aspek lain dapat muncul berkaitan dan disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan lokasi di mana kegiatan itu dilaksanakan. Aspek-aspek tersebut diharapkan melengkapi konsep kunci, antara lain:

- Relevansi (tingkat keperluan/hubungan)
- Efektivitas dan berkaitan ketepatan penggunaan dana
- Dampak
- Advokasi

- Dapat ditiru (menjadi model untuk dikembangkan di tempat lain)
- Koordinasi

Aspek-aspek diatas menjadi parameter dalam mengevaluasi program secara keseluruhan, dan dalam monitoring per kegiatan.

Apa Persyaratan PIMES?

PIMES mensyaratkan hal-hal berikut ini:

- Harus menjadi bagian dalam proses pengembangan Program KBBM. Upaya pengembangan indikator, metode dan perangkatnya harus didasarkan atas kebutuhan seluruh proses sejak awal
- Berbasiskan masyarakat, dan dapat diterapkan di wilayah-wilayah yang berbeda.
- Indikator dan metode pengumpulan informasi disesuaikan dengan keadaan setempat, tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat, serta pelaksana Program KBBM.
- Indikator dan metode pengumpulan informasi harus dapat menggambarkan perubahan yang terjadi di masyarakat sehubungan pelaksanaan Program KBBM, bukan perubahan yang disebabkan pembangunan secara umum.
- Melibatkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan:
 - Untuk mengembangkan dan menggunakan indikator dan perangkatnya.
 - Untuk menganalisis, melaporkan dan memberikan umpan balik.
 - Untuk melakukan perubahan yang diperlukan.
- Harus memperkuat partisipasi dalam pemanfaatan informasi dan umpan balik pada pelaksanaan Program KBBM di semua tingkatan, termasuk masyarakat, relawan, pelaksana program dan lembaga-lembaga donor.
- Di setiap daerah dimana Program KBBM dinakan, pelajaran yang dapat dipetik harus dibagikan dan menjadi rekomendasi pengembangan kerangka kerja PIMES selanjutnya.

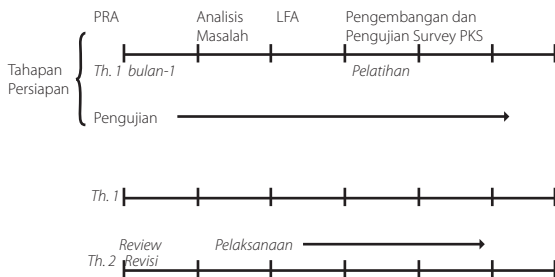
Proses Adaptasi PIMES

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan tahapan-tahapan proses adaptasi PIMES dalam Program KBBM.
- Menyebutkan lima tugas utama PIMES.
- Menjelaskan tahapan adaptasi PIMES dalam pelaksanaan Program KBBM.

Bagaimana Adaptasi Tahapan-tahapan PIMES dalam Program KBBM?

PIMES harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan Program KBBM. Alur perencanaan program termasuk PIMES, ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.3. Alur perencanaan dan pelaksanaan Program KBBM menggunakan PIMES

PIMES sebagai pendekatan berbasis partisipasi masyarakat hanya akan cocok dalam program yang menggunakan pendekatan yang sama. Dengan kata lain, semua tahapan dalam siklus Program KBBM memerlukan pendekatan dan metode yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Tahap pertama dalam siklus program Gambar 4.1. adalah **studi kelayakan dan penilaian kebutuhan awal**, metode yang sering diterapkan adalah **PRA (Participatory Rural Appraisal)** atau Pengkajian Desa Partisipatif.

Pendekatan ini memungkinkan masyarakat ber-

partisipasi sejak awal dalam hal penilaian, definisi dan prioritas kebutuhan, sumber daya, hak-hak dan masalah, serta menyusun data prioritas masalah dari program yang dilaksanakan. Pelaksanaan Program KBBM di wilayah-wilayah percontohan menunjukkan bahwa PRA dilakukan oleh anggota masyarakat sendiri, dibantu oleh relawan PMI.

Pelatihan PRA pertama kali dilakukan dengan 3 hari lokakarya “analisis masalah” di lapangan. Daftar masalah selanjutnya dianalisis secara lebih mendalam. Masyarakat dibagi beberapa kelompok, kemudian difasilitasi untuk menganalisis setiap masalah dengan membuat apa yang disebut “pohon masalah”. Mereka diminta menggunakan kata-kata nya sendiri. Mereka perlu menuliskan:

- Hal-hal yang mendorong timbulnya masalah.
- Hubungan antara pendorong masalah tersebut.
- Kemungkinan merumuskan apa yang merupakan masalah utama.
- Dampak permasalahan atau konsekuensinya.

Di desa-desa di mana Program KBBM dilaksanakan, walaupun masyarakat mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, namun tidak mengurangi partisipasi mereka. Masyarakat memiliki ketertarikan yang tinggi dalam mendiskusikan apa yang terjadi di tempat tinggal mereka. Masyarakat juga termotivasi untuk berperan dalam upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko, bahkan menjadi relawan PMI.

Tahap kedua dalam siklus program adalah **Lokakarya Perencanaan Program** dengan metode **LFA (Logical Framework Approach)**.

Lokakarya ini biasanya membutuhkan waktu beberapa hari. Mereka yang menghadiri kegiatan ini adalah perwakilan masyarakat, staf pelaksana program dan para relawan. Agenda kegiatan ini mencakup:

- Mengkaji secara tujuan Program KBBM secara umum, dan tujuan program dalam jangka menengah maupun jangka pendek.
- Merumuskan tujuan secara khusus di desa atau wilayah setempat.
- Merumuskan hasil-hasil yang ingin dicapai (*output*) dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan setiap pemecahan masalah.
- Merumuskan hal-hal yang diperlukan (*input*) dan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan anggarannya.

Pada LFA indikator dan asumsi bisa juga dirumuskan. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan Survey Perilaku, Sikap dan Keterampilan (PKS). *Survey* PKS dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai pengetahuan, pandangan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan satu masalah yang diprioritaskan. Sebagai contoh: Ancaman banjir yang sering terjadi pada musim hujan, survey dilakukan untuk mengetahui apakah ada kebiasaan atau sikap-sikap yang dapat mengurangi risikonya.

Tahap Ketiga *Survey* Pengetahuan, Sikap dan keterampilan (PSK) dan *Baseline Survey*.

Pada saat tahap pertama dan kedua tunai dilaksanakan, tahap PIMES selanjutnya mengemban 5 (lima) tugas:

1. Mengembangkan indikator-indikator.
2. Merancang sistem monitoring dan evaluasi.
3. Mengembangkan/mengadaptasi perangkat pengumpulan informasi.
4. Melatih dan mengawasi staf dan relawan yang terlibat Program KBBM.
5. Mengumpulkan, mengkaji dan melaporkan informasi, sekaligus informasi yang bersifat umpan balik, untuk tujuan pembelajaran dan manajemen.

Tugas kesatu dan kedua dilaksanakan dengan sebuah lokakarya yang melibatkan para pelaksana lapangan yaitu staf PMI Cabang/Daerah yang

menangani kesiapsiagaan bencana, relawan dan perwakilan masyarakat yang menerima manfaat Program KBBM.

Tugas pertama: kembangkan indikator-indikator dengan melibatkan peserta lokakarya, bagilah para peserta berdasarkan asal desa mereka masing-masing atau lingkup kerja mereka.

1. Pahami karakteristik setiap tahap Program KBBM, tetapkan indikator-indikator atas kegiatan-kegiatan pendukung program baik melalui diskusi, studi kasus dan contoh-contoh program.
2. Buatlah daftar indikator sesedikit mungkin, terutama indikator yang
 - Sesuai dengan kegiatan setempat
 - Sesuai dengan tujuan dan output dari LFA
 - Sesuai dengan 3 (tiga) tahapan:
 - Pada saat kegiatan dimulai
 - Pada saat terjadi perubahan pada perilaku, sikap dan keterampilan
 - Pada saat terjadi perubahan pada situasi kesiapsiagaan terhadap ancaman (bencana), kesehatan dan sosial ekonomi dimana Program KBBM dilaksanakan.
 - Sesuai dengan konsep pokok
 - Sesuai dengan kenyataan di lapangan
3. Tandai indikator-indikator yang menggambarkan 3 (tiga) tahapan kemajuan dan indikator yang menggambarkan konsep pokok.
4. Pastikan bahwa setiap tahapan dan konsep pokok memiliki beberapa indikator.
5. Setiap kelompok menyampaikan hasil penyusunan indikatornya untuk diketahui seluruh peserta, sekaligus dapat memberikan pandangan.

Tugas kedua: buatlah rencana sistem monitoring dan evaluasi dengan melibatkan para pelaksana lapangan, relawan dan masyarakat, lakukan hal berikut:

- Tentukan indikator-indikator yang membutuhkan informasi dari lapangan.

- Cari tahu kemungkinan informasi (mengenai indikator) tersebut dimiliki oleh sumber-sumber tertentu, misalnya pemerintah daerah, departemen kesehatan, LSM dll.
- Buatlah rencana pengumpulan informasi, pengkajian dan pelaporan.
- Buatlah rencana pengembangan/adaptasi perangkat pengumpulan data.
- Buatlah rencana pelatihan dan pengawasan bagi staf dan relawan.

Setelah lokakarya, peserta harus berbagi pemahaman dan pengetahuan, dengan pihak-pihak lain yang tidak terlibat, baik staf PMI Cabang/Daerah, relawan, masyarakat maupun lembaga-lembaga lain yang mungkin menjadi mitra dalam Program KBBM. Program KBBM memberikan ruang untuk penyesuaian atas datangnya pemikiran-pemikiran baru di masa datang.

Tugas ketiga: kembangkan/adaptasikan perangkat pengumpulan data yang dilaksanakan di wilayah Program KBBM.

Dalam hal ini, para pelaksana lapangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya tentang bagaimana informasi lapangan dapat dikumpulkan. Di beberapa desa percontohan pelaksanaan Program KBBM, dalam *baseline survey*, para relawan PMI akan memberikan pertanyaan secara lisan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Jawaban yang diberikan oleh masyarakat dicatat oleh para relawan. Hal ini dilakukan karena tidak semua anggota masyarakat dapat menuliskan sendiri jawaban mereka. Kemampuan menggunakan bahasa daerah juga sangat membantu di desa-desa tertentu.

Dalam Program KBBM, pengembangan perangkat pengumpulan informasi hendaknya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang benar (sah), sederhana dan berguna. Pendekatan yang di-

gunakan beranjak dari "akal sehat" (*common sense*) bukan ditujukan untuk riset atau penelitian. Tentu saja cara-caranya dapat juga ditemukan di berbagai buku-buku sumber.

Tugas keempat: melatih dan mengawasi staf dan relawan yang terlibat Program KBBM.

Dalam Program KBBM para relawan di tingkat desa atau kelurahan adalah pengumpul data atau informasi lapangan, sekaligus pelaksana kegiatan. Mereka tentunya juga berperan aktif dalam pengembangan indikator, perencanaan dan penilaiannya. Bantuan mereka dalam menyusun dan mengkaji data lapangan serta perubahan-perubahan yang ada di masyarakat akan sangat membantu.

Staf PMI Cabang/Daerah yang berperan sebagai pelaksana lapangan Program KBBM harus mampu mengembangkan dan menerapkan PIMES, terutama dalam hal pelatihan, pengorganisasian, pemantauan, penyusunan laporan, pengkajian dan pengumpulan umpan balik dari lapangan. Para pelaksana lapangan dapat juga menyarankan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Program KBBM, terutama yang berhubungan dengan pendanaan.

Pada awal pelaksanaan Program KBBM para pelaksana lapangan baik Staf PMI Cabang/Daerah dan relawan sebaiknya mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan.

Tugas kelima: mengumpulkan, mengkaji dan melaporkan informasi, sekaligus informasi yang bersifat umpan balik, untuk tujuan pembelajaran dan manajemen.

Data kegiatan secara khusus dikumpulkan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan program. Data perubahan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan (PSK) situasi penanganan atau kesiapsiagaan

bencana, situasi kesehatan dan sosial ekonomi yang dikumpulkan setiap 3 - 6 bulan, atau sebelum dan setelah kegiatan khusus seperti penyuluhan malaria, kerja bakti 3M dll. Data-data ini dikaji dan diperbandingkan.

Dalam proses sebuah tim harus dibentuk untuk kemudian melaporkannya ke Markas Pusat PMI dalam laporan semesteran. Dengan demikian PMI Pusat mendapatkan gambaran perkembangan di setiap wilayah di mana Program KBBM dilaksanakan. Permasalahan yang mungkin muncul ada baiknya juga dilaporkan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya seperti kebutuhan pendanaan, penyimbangan, kurangnya pelatihan, keterlambatan, sumber daya manusia dll. Jalan keluar dari permasalahan yang ada mungkin bisa dijadikan referensi bagi daerah lain.

Laporan kemajuan di sebuah desa di mana dilaksanakan Program KBBM juga akan sangat bermanfaat untuk diketahui desa-desa lainnya. Mereka dapat saling belajar satu sama lain dengan saling berbagi informasi, ide dan pengalaman.

Laporan tersebut juga kemudian menjadi dasar

bagi pembuat kebijakan untuk memberikan dukungan dan upaya pengembangan Program KBBM selanjutnya. Setelah tahap percontohan Program KBBM, diharapkan program serupa bisa dilaksanakan di berbagai desa di Indonesia.

Adaptasi PIMES dalam Tahapan Program KBBM

Pada tahapan Program KBBM, indikator-indikator yang dikembangkan pada saat PRA dan LFA, seperti halnya pada survey PKS atau *base line survey* dijadikan dasar dan input pada tahapan pelaksanaan. Selanjutnya indikator-indikator juga digunakan pada tahap perencanaan dan monitoring.

PIMES pada dasarnya menyatu dalam tahapan Program KBBM. Pembahasan PIMES dipisahkan secara khusus agar pelaksana program dapat memahami lebih mendalam dan dapat melaksanakan PIMES bagi program-program lainnya. Sebagai program yang berbasis masyarakat Program KBBM menekankan adanya masukan dari masyarakat sebagai umpan balik agar pelaksanaan program di masa yang akan datang menjadi lebih baik.



Foto 4.2. Umpan balik penting untuk perbaikan Program KBBM
Pengembangan indikator pada lokakarya harus melibatkan masyarakat, Desa Sepabatu, Polewali

Bab V

Sosialisasi, Advokasi dan Kemitraan

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menyebutkan siapa saja yang dapat menjadi mitra PMI dalam pelaksanaan Program KBBM
- Menjelaskan mengapa diperlukan kemitraan atau kerjasama
- Menjelaskan bagaimana membina kemitraan dengan pemerintah daerah
- Menjelaskan apa yang diharapkan dari kemitraan dengan pemerintah daerah
- Menjelaskan apa yang perlu dilakukan setelah pemerintah daerah menyatakan ketertarikannya terhadap Program KBBM?
- Mengetahui bagaimana melakukan sosialisasi, advokasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah atau institusi lainnya

Siapa Saja yang Dapat Menjadi Mitra?

Instansi pemerintah yang terkait langsung dalam bidang penanganan bencana harus dilibatkan dalam Program KBBM. Instansi yang dimaksud antara lain Pemda baik tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Dinas Kehutanan, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan sebagainya.

Mengapa Diperlukan Kemitraan?

Program KBBM adalah program multi-sektor dan multi-disipliner yang dibentuk atas dasar kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah maupun berbagai institusi atau organisasi.

PMI Daerah/Cabang harus melakukan pendekatan dengan mitra potensialnya di masing-masing tingkatan.

Sejak seleksi wilayah program sampai pelaksanaan program harus melibatkan mitra. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam menyukseskan Program KBBM.

Program KBBM bertujuan menurunkan tingkat kerentanan masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, Program KBBM berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah untuk mencegah, memitigasi dan mempersiapkan diri jika terjadi bencana. Mengingat Pemda adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah kemasyarakatan di wilayahnya, maka kemitraan dengan pemerintah setempat mutlak dilakukan.

Bagaimana Membina Kemitraan dengan Pemda?

Membina kerja sama dan kemitraan tentu saja tidak mudah. Perlu upaya-upaya konsultasi dan advokasi yang tidak kenal putus asa. Mengembangkan sensitivitas dalam sistem administrasi dan politik menjadi sebuah keharusan.

Agenda konsultasi dengan Pemda:

- Pengantar
- Menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan konsultasi
- Presentasi prinsip dasar kepalangmerahan, visi/misi dan strategi PMI di bidang penanggulangan bencana.
- Program KBBM sebagai pendekatan baru dalam manajemen penanggulangan bencana
- Diskusi dan tanya jawab
- Kesepakatan kerja sama dan kemitraan

Kita paham dan sadar bahwa untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari sistem administrasi dan politik tidaklah mudah. Pada awalnya, mungkin saja staf Pemda tidak memberikan dukungan yang cukup. Permasalahannya tidak hanya soal kapasitas namun juga kesungguhan dan komitmen Pemda sebagaimana yang digambarkan dalam konsep Program KBBM. Mungkin ada pendapat bahwa program ini tidak realistis, di sisi lain ada keengganan untuk memberi anggaran bagi upaya-upaya mitigasi. Namun nampaknya tidak mungkin mengerahkan para relawan dan kemampuan masyarakat saja untuk memprakarsai program-program berskala besar.

Konsultasi pertama kali dengan Pemda umumnya memakan waktu 3 - 4 jam.

Selanjutnya kunjungan-kunjungan harus terus dilakukan dengan tidak kenal putus asa. Staf pelaksana lapangan Program KBBM diharapkan dapat mengatasi ganjalan komunikasi dan kesulitan-ke-

sulitan dalam mencairkan kekakuan sistem administrasi dan birokrasi keuangan di Pemda.

Serangkaian pertemuan dan konsultasi perlu dilakukan untuk mengklarifikasi isu-isu dan meyakinkan pihak Pemda agar mendukung Program KBBM dan rencana program yang telah dirumuskan.

Elemen program yang mendasar secara politis adalah peranan kehumasan dalam memberikan kontribusi pada Program KBBM. Kehumasan dapat memberikan citra negatif jika Pemda tidak peduli tentang keselamatan masyarakatnya dan meninggalkan PMI dan masyarakat sendirian untuk mendukung rencana kesiapsiagaan bencana setempat. Maka sangat penting untuk meyakinkan pada Pemda bahwa dukungannya akan memberikan citra positif. Pada saat yang sama, Program KBBM membantu mendorong sistem pemerintahan dan BPBD untuk dapat lebih berperan.

Apa yang Diharapkan dari Kemitraan dengan Pemda?

Membina kemitraan dengan Pemda adalah prasyarat yang menentukan keberhasilan Program KBBM. Salah satu sasaran kemitraan tersebut adalah agar Pemda mau mendukung sepenuhnya Program KBBM. Dalam artian, Pemda tidak hanya menyetujui keberadaan Program KBBM namun harus menjamin ketersediaan dana maupun dukungan lain untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya kesiapsiagaan bencana.

Dukungan nyata dari Pemda dapat berupa:

- Material
- Transportasi
- Peralatan berat, khusus untuk kerja konstruksi
- Gaji tenaga profesional
- Makanan untuk para relawan (khususnya pada pengerjaan pembuatan sarana fisik mitigasi)

Selain dukungan, sasaran lainnya adalah terlembagakannya Program KBBM di Pemda. Ini dapat difasilitasi melalui keterwakilan pemerintah provinsi dalam Komite Manajemen KBBM di tingkat daerah dan keterwakilan pemerintah kabupaten dalam Komite Manajemen KBBM di tingkat cabang.

Kemitraan dengan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Satlak tidak hanya mendatangkan dukungan teknis dan keuangan, namun juga terlembagakannya Program KBBM sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan bencana di tingkat Satlak dan Satkorlak.

Kelembagaan Program KBBM diharapkan dapat lebih memotivasi Pemda dan BPBD tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan bencana dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program KBBM juga diharapkan dapat diintegrasikan dalam rencana pembangunan kota/kabupaten, kecamatan atau desa/kelurahan, serta dalam alokasi anggaran rutin pembangunan.

Setelah Pemda Ingin Mendukung Program KBBM, Apakah yang Kita Lakukan?

Bila konsultasi dan advokasi yang dilakukan PMI kepada Pemda, BPBD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, maupun instansi lainnya menunjukkan tanda-tanda positif, maka langkah selanjutnya adalah mewujudkan keinginan kerja sama dan dukungan tersebut dalam MoA (*Memorandum of Agreement*) atau memorandum kesepakatan. MoA tersebut berisi bentuk kerja sama atau kemitraan dan tugas/tanggung jawab PMI Daerah dengan pemerintah provinsi maupun PMI Cabang dengan pemerintah kota/kabupaten.

Contoh MoA antara PMI dan Pemda tertera jelas pada MoA-1, sedangkan antara PMI dan masyarakat penerima Program KBBM dapat dilihat pada MoA-2.

MoA ini merupakan dasar yang digunakan untuk merealisasikan kemitraan yang telah disetujui bersama. Contoh MoU antara pemda Kabupaten, PMI Cabang dan Tim Sibat seperti tercantum pada halaman berikutnya.

MoA -1

Memorandum Kesepakatan antara PMI Daerah dan Pemda Provinsi

Untuk diketahui oleh semua pihak bahwa:

Memorandum Kesepakatan ini dibuat oleh :

..... (nama) sebagai Ketua PMI Daerah, atas nama PMI Daerah
..... dan (nama) sebagai Gubernur/Sekda/
Bupati/Sekda atas nama Pemerintah Propinsi/Kabupaten

PMI Daerah akan:

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan kapasitas masyarakat melalui pengadaan pendidikan dan pelatihan, penyadaran dan pemberdayaan lainnya.
2. Merencanakan mekanisme untuk implementasi, monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan masyarakat.
3. Mengadakan bantuan teknis dalam pemetaan bahaya, risiko, dan sumber daya.

Pemerintah Propinsi akan:

1. Menyediakan estimasi program, desain program dan kebutuhan lain untuk implementasi program.
2. Menyediakan bantuan untuk peralatan/fasilitas peralatan untuk konstruksi program.
3. Mengalokasikan bantuan anggaran untuk program mitigasi.
4. Melakukan monitoring dan supervisi berkala, mulai saat implementasi sampai selesai.
5. Menyediakan tenaga teknis yang dapat memobilisasi masyarakat dalam pengerjaan program mitigasi.
6. Mendukung PMI Daerah dalam Program KBBM, khususnya yang menyangkut dukungan dana dan keberlangsungan (sustainability).

Kesepakatan ini menjadi dasar bagi kerja sama dan kemitraan dari kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hari..... tanggal
oleh:

Pemerintah Provinsi

Gubernur

.....

PMI Daerah

Ketua PMI Daerah

.....

MoA-2

Memorandum Kesepakatan

antara Pemda Kabupaten/Kota, PMI Cabang, Masyarakat dan Tim Sibat

Untuk diketahui oleh semua pihak bahwa:

Memorandum Kesepakatan ini dibuat oleh dan di antara:

Pemerintah Kabupaten/Kota..... Provinsi yang diwakili oleh (nama) sebagai Bupati/Walikota/Sekda dan

PMI Cabang Kabupaten/Kota..... yang diwakili oleh (nama) sebagai Ketua PMI Cabang dan

Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota..... yang diwakili oleh (nama) sebagai Kepala Desa/Lurah dan

Tim Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) yang diwakili oleh (nama) sebagai Ketua Tim Sibat.

Pemerintah Kabupaten/Kota..... akan:

1. Menyediakan estimasi program, desain program dan kebutuhan lain untuk implementasi program.
2. Menyediakan bantuan peralatan/fasilitas peralatan untuk konstruksi program.
3. Mengalokasikan anggaran untuk program mitigasi.
4. Melakukan monitoring dan suprevisi berkala, mulai saat implementasi sampai selesai.
5. Menyediakan tenaga teknis yang dapat memobilisasi masyarakat dalam pengerjaan program mitigasi.
6. Mendukung PMI Cabang dalam Program KBBM, khususnya yang menyangkut dukungan dana dan keberlangsungan (sustainabilitas).

PMI Cabang akan:

1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan kapasitas masyarakat melalui pengadaan pendidikan dan pelatihan, penyadaran dan pemberdayaan lainnya.
2. Merencanakan mekanisme untuk implementasi, monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan Tim Sibat di Desa/kelurahan dan anggota masyarakat lainnya.
3. Mengadakan bantuan teknis dalam pemetaan bahaya, risiko dan sumber daya.
4. Menyediakan seragam, atribut dan perlengkapan standar Tim Sibat.

Masyarakat Desa/Kelurahan akan:

1. Mempersiapkan proposal program dengan lampiran resolusi dan mengajukannya kepada Pemerintah Kabupaten untuk konstruksi mitigasi
2. Menyediakan sumber-sumber daya (material) yang tersedia di desa/kelurahan setempat seperti batu, pasir, kerikil dan sebagainya yang diperlukan untuk upaya mitigasi/pengurangan risiko bencana.
3. Mengadakan pemeliharaan yang baik terhadap program dan semua fasilitas yang akan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, serta memperbaikinya bilamana diperlukan.
4. Membantu Tim Sibot di Desa/Kelurahan dalam memprakarsai latihan Evakuasi Bencana/Gladi/Simulasi yang diikuti oleh semua kelompok masyarakat agar lebih terbiasa dengan cara-cara nyata evakuasi serta upaya tanggap darurat lainnya selama terjadi bencana.
5. Mengamankan dokumen-dokumen yang perlu untuk konstruksi program mitigasi.
6. Membentuk jadwal waktu kerja gotong-royong masyarakat dalam program konstruksi mitigasi bencana untuk para pekerja dan relawan masyarakat.
7. Mendukung secara penuh Program KBBM yang diinisiasi oleh PMI Cabang dan Pemerintah Kabupaten.

Tim Sibot di tingkat Desa/Kelurahan akan:

1. Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membuat proposal program dengan lampiran resolusi dan mengajukannya kepada Pemerintah Kabupaten.
2. Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program.
3. Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyusunan Rencana Mitigasi, Rencana Kerja Program KBBM, termasuk Rencana Tanggap Darurat Bencana.
4. Melakukan upaya penyadaran masyarakat terhadap bahaya, risiko dan dampak bencana.
5. Melakukan upaya sosialisasi Program KBBM.
6. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, baik melalui pelatihan, gladi, simulasi, pendampingan dan lain-lain yang mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kesiapsiagaan bencana, pencegahan, mitigasi, maupun tanggap darurat bencana.
7. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kerja bakti secara bergotong-royong dalam pembangunan konstruksi mitigasi.
8. Menggerakkan masyarakat dalam pemeliharaan yang baik terhadap program dan semua fasilitas yang akan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, serta mengupayakan perbaikan bilamana diperlukan.
9. Melakukan latihan Evakuasi Bencana/Gladi/Simulasi yang diikuti oleh semua elemen masyarakat agar lebih familiar dengan cara-cara nyata evakuasi serta upaya tanggap darurat lainnya selama terjadi bencana.

10. Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Program KBBM dan keberlangsungan program.
11. Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengorganisasikan upaya penggalan dana untuk mitigasi maupun keberlangsungan (sustainabilitas) program.

Ditetapkan di Hari tanggal
oleh:

Tim Sibat Desa/Kelurahan Pemerintah Desa/Kelurahan
Ketua Kepala Desa/Lurah,

.....

.....

Pemerintah Kabupaten/Kota..... PMI Cabang Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota/Sekda*) Ketua,

.....

.....

Bab VI

Pembentukan Tim

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan apa itu Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat)
- Menyebutkan siapa saja yang dapat menjadi Tim Sibat
- Menjelaskan bagaimana komposisi Tim Sibat
- Menjelaskan kriteria dan persyaratan Tim Sibat
- Memfasilitasi masyarakat bagaimana merekrut Tim Sibat
- Memfasilitasi masyarakat bagaimana membentuk Tim Sibat

Apa itu Tim Sibat?

Tim Sibat adalah anggota masyarakat yang menyatakan diri menjadi relawan PMI dan bersedia mendarmabaktikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Mereka memotivasi dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya agar mampu melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di desa/kelurahan Program KBBM.

Tim Sibat, berasal dari “desa/kelurahan mitra” PMI Cabang setempat dan telah mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari seluruh masyarakat, serta telah dididik dan dilatih upaya-upaya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana.

Tim ini adalah milik masyarakat, berasal dari masyarakat, dan bekerja untuk masyarakat. Kader Tim ini tidak hanya berfungsi sebagai narasumber dalam pendampingan dan pembinaan Program KBBM di desa/kelurahan daerah pelaksanaan program, namun mereka juga bisa memainkan peranan sebagai fasilitator, motivator, dinamisator dan motor penggerak kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.

Mengapa Perlu Tim Sibat?

Upaya-upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana hanya akan efektif bila upaya pemberdayaannya menjangkau masyarakat di level paling rentan. Hal ini karena merekalah pihak yang secara langsung paling menderita karena dampak bencana.

Dengan Program KBBM, PMI melakukan langkah-langkah pemberdayaan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang paling rentan dan hidup di daerah rawan bencana. Langkah pemberdayaan ini diawali dengan rekrutmen dan pembentukan Tim Sibat.

Anggota Tim Sibat dipilih dari masyarakat, oleh masyarakat, dan mereka akan menjalankan Program KBBM yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungannya. Mereka akan menyelenggarakan pelatihan, penyadaran dan pemberdayaan kapasitas masyarakat di bidang kesiapsiagaan bencana dan langkah-langkah tanggap darurat bencana.

Dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana yang diberikan PMI melalui Tim Sibat, masyarakat dapat siap-siaga dan memainkan peranan langsung sebagai *"the first responder"* yang mampu melakukan upaya pertolongan atau penyelamatan diri, keluarga, maupun warga masyarakat lainnya.



Foto 6.1. Sibat sebagai garda terdepan dalam mobilisasi masyarakat Program KBBM Laelo Wajo, Sulawesi Selatan

Terbentuknya Tim Sibat, khususnya di desa/kelurahan percontohan Program KBBM, diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi upaya-upaya kesiapsiagaan bencana maupun tanggap darurat bencana di desa/kelurahannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan citra positif PMI.

Apa Fungsi dan Peranan Tim Sibat?

Tim Sibat berfungsi dan berperan sebagai pendamping, pembimbing, penyuluh, dan motivator yang menggerakkan masyarakat setempat dalam kegiatan dan upaya-upaya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana di wilayahnya.

Keberadaan Tim Sibat dimaksudkan pula untuk membantu Pengurus Cabang PMI dan KSR Spesialis PBBM dalam membina dan menggerakkan masyarakat, serta mengarahkan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.

Bagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Tim Sibat?

• Tugas dan Tanggung Jawab Umum:

Melakukan upaya pemberdayaan kapasitas dan pengorganisasian masyarakat agar dapat mengambil inisiatif dan melakukan tindakan yang meminimalkan dampak bencana di lingkungannya dengan menggunakan strategi dan pendekatan konsep KBBM.

• Tugas dan Tanggung Jawab Khusus:

Tim Sibat bertanggung jawab menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan Program KBBM, melalui:

Sosialisasi konsep KBBM dan kesadaran masyarakat tentang tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana dari rumah ke rumah atau dari keluarga ke keluarga maupun kepada masyarakat luas dalam berbagai kesempatan.

- Bersama masyarakat melakukan pemetaan desa/kelurahan tentang tingkat kerentanan/kerawanan maupun pemetaan sumber daya.
- Memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat di lingkungannya tentang upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana maupun sistem peringatan dini dan upaya-upaya mitigasi.
- Menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan rencana kegiatan.
- Membantu aparat desa/kelurahan, LPM, maupun BPD dalam merumuskan Rencana Pengendalian dan Operasional melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan maupun upaya-upaya tanggap darurat bencana.
- Menyelenggarakan pelatihan/simulasi/gla-di bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa terbiasa dan mampu melaksanakan langkah-langkah evakuasi dan upaya-upaya penyelamatan dan pengamanan diri saat terjadi bencana.

- Membantu merumuskan cara-cara menjaga keberlangsungan program melalui pencarian dana, penyadaran sosial dan lain-lain.
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan keberlangsungan Program KBBM.
- Mengorganisir masyarakat dalam melaksanakan berbagai program terkait, seperti Program CBFA, pelestarian lingkungan hidup, perawatan keluarga, dan lain-lain.
- **Membantu Komite Manajemen Tingkat Desa/Kelurahan:**
 - Mempersiapkan dan mengirimkan rencana kegiatan per triwulan, termasuk rincian anggaran berdasarkan kegiatan untuk periode 3 bulan ke depan.
 - Mempersiapkan dan mengirimkan laporan kemajuan per triwulan, termasuk laporan keuangan kegiatan triwulan sebelumnya.
 - Mengorganisir pelaksanaan rencana dan menggerakkan masyarakat.
 - Sebagai penghubung dengan Pemda di tingkat kecamatan dan PMI Cabang di tingkat kabupaten/kota dalam bidang penanggulangan bencana.
 - Membina hubungan sosial di dalam lingkungan masyarakat serta memastikan bahwa program tersebut akan membawa manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
 - Menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program KBBM di tengah masyarakat.
 - Melakukan peninjauan dan monitoring terhadap kemajuan program.
- Membantu tugas dan kewajiban Tim Satgana PMI saat menjalankan Program KBBM maupun tanggap darurat bencana di daerahnya, baik sebelum, pada saat dan setelah bencana.

Apa Kriteria dan Persyaratan Tim Sibat?

Agar mampu menjalankan tugas dan perannya dengan baik, seorang kader pendamping seyogyanya memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- Bertempat tinggal tetap di desa/kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program KBBM (bukan pendatang).
- Berusia 21 - 60 tahun.
- Berminat menjadi Tim Sibat.
- Minimal berpendidikan SLTP.
- Mampu berkomunikasi dengan efektif dan mempunyai hubungan luas.
- Dapat bekerja sama dengan masyarakat, PMI dan institusi lain.
- Memiliki kompetensi dan ketrampilan manajemen kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat.
- Berjiwa pemimpin, mempunyai integritas dan pengabdian yang tinggi.
- Diterima dan dipercaya oleh pamong, tokoh masyarakat dan masyarakat luas.
- Bekerja dengan tulus, ikhlas dan tanpa pamrih demi kepentingan masyarakat.

Bagaimana Komposisi Keanggotaan Tim Sibat?

- Jumlah anggota Tim Sibat yang akan direkrut di setiap desa/kelurahan mitra wilayah Program KBBM adalah sebanyak 20 orang.
- Rekrutmen anggota Tim Sibat memperhatikan keseimbangan gender: laki-laki (50%) dan perempuan (50%), yang dapat diambil dari unsur:
 - Kader Posyandu/bidan desa atau kelurahan/Pos Persalinan Desa/Kelurahan (Polindes).
 - PKK.
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - Badan Perwakilan Desa.

- Karang Taruna.
- Tokoh agama.
- Tokoh masyarakat.
- Unsur-unsur lain di dalam masyarakat setempat.

Bagaimana Struktur Organisasi Tim Sibat?

- Tim Sibat akan direkrut dan dibentuk oleh masyarakat dan aparat desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim ini bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah.
- Tim Sibat terdiri dari: 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan minimal 18 orang anggota (dengan pertimbangan 1 anggota Sibat untuk minimal 50 Kepala Keluarga).
- Struktur dan kelengkapan Tim Sibat diatur dan ditentukan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing desa/kelurahan.

Bagaimana Merekrut dan Membentuk Tim Sibat?

- Tim Sibat bukan sekadar sukarelawan biasa. Selain diharapkan mampu memainkan peranan sebagai penggerak dan motivator masyarakat, Tim Sibat harus mampu mengorganisir masyarakat dalam pelaksanaan Program KBBM dan memelihara keberlanjutannya. Karenanya, perekrutan Tim Sibat harus benar-benar sesuai dengan kriteria kualifikasinya.
- Sebagai mitra terdepan dalam Program KBBM, Tim Sibat direkrut dan dibentuk atas dasar partisipasi bersama dengan masyarakat dan aparat desa/kelurahan setempat.

• Tahap Persiapan Rekrutmen:

- Melakukan pendekatan dengan pamong desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta dinas-dinas terkait untuk mensosialisasikan Program KBBM dan perlunya pembentukan Tim Sibat.
- Sebelum melaksanakan rekrutmen dan pembentukan, Pengurus PMI Cabang mengadakan pertemuan konsultasi dengan pihak aparat desa/kelurahan untuk:
 - Membahas rencana rekrutmen dan menetapkan kriteria calon kader PMI.
 - Membahas fungsi dan peranan, tugas dan kewajiban, serta keberadaan Tim Sibat.
 - Mempersiapkan kelengkapan administrasi rekrutmen, seperti biodata dan format wawancara.
- Bersama anggota masyarakat, selanjutnya kepala desa/lurah atau aparat desa/kelurahan membahas kriteria/persyaratan serta mengidentifikasi siapa saja yang memenuhi kriteria/persyaratan tersebut untuk direkrut sebagai anggota Tim Sibat.
- Setiap calon diwajibkan mengisi biodata serta pernyataan komitmen dan kesediaannya sebagai Tim Sibat.



Foto 6.2. Sibat memberdayakan masyarakat – Program KBBM Laelo Wajo, Sulawesi Selatan

• Tahap Seleksi/Rekrutmen:

- Proses seleksi Tim Sibat dilakukan sepenuhnya oleh kepala desa/lurah, aparat desa/kelurahan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan objektif sesuai kriteria/persyaratan yang telah disepakati.
- PMI Cabang dan KSR Spesialis KBBM hanya membantu memfasilitasi proses seleksi dan penyiapan instrumen seleksi/rekrutmen, sehingga tidak terkait langsung dengan proses seleksi.
- Pada tahap seleksi ini dilakukan:
 - Proses seleksi terhadap persyaratan administrasi calon.
 - Wawancara langsung dengan para calon dengan kuesioner standar yang telah disiapkan oleh PMI Cabang dan KSR Spesialis KBBM.
 - Pengujian terhadap kemampuan
 - Pengumuman hasil seleksi Tim Sibat yang disampaikan secara langsung setelah proses seleksi.

• Pembentukan:

- Daftar nama calon anggota Tim Sibat yang telah lolos seleksi selanjutnya diajukan kepala desa/lurah ke Pengurus PMI Cabang.
- Pengurus PMI Cabang menetapkan dan mengukuhkan para calon yang telah lolos seleksi tersebut sebagai anggota Tim Sibat.
- Sebelum dikukuhkan, para calon menandatangani surat pernyataan komitmen dan kesediaannya menjadi anggota Tim Sibat.

Bab VII

Pendidikan dan Pelatihan KBBM

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan KBBM.
- Menjelaskan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan KBBM.
- Menggambarkan alur proses pendidikan dan pelatihan KBBM.
- Menjelaskan kurikulum, materi pendidikan dan pelatihan KBBM.

Apa Saja Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan dalam Program KBBM?

Proses transfer konsep, strategi dan pendekatan KBBM kepada masyarakat merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan Program KBBM. Proses transfer ini diharapkan dapat memberikan perbaikan pada Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan (PSK) sekaligus pengembangan kapasitas di bidang kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.

Pendidikan dan pelatihan Program KBBM dilaksanakan di setiap tingkatan, dengan tetap mengandalkan pendekatan partisipatif dan prinsip kegotong-royongan. Jenjang pelatihan yang dilaksanakan Program KBBM mengikuti standarisasi PMI (seperti pada tabel halaman 46).

Bagaimana Pendidikan dan Pelatihan KBBM Dilaksanakan?

Pendidikan dan pelatihan KBBM dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

PMI Cabang bertanggung jawab mengorganisir pendidikan dan pelatihan KSR Spesialis KBBM yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerjanya. Selanjutnya KSR tersebut melaksanakan pendidik-

an dan pelatihan bagi Tim Sibab di desa/kelurahan setempat. Setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Tim Sibab melakukan upaya-upaya sosialisasi, penyadaran, dan pengembangan kapasitas masyarakat di desa/kelurahan tempat tinggal mereka, yang terkait dengan penanganan bencana, khususnya upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana, pencegahan dan mitigasi.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Tim Sibab dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan, tergantung situasi di desa/kelurahan setempat, seperti: kunjungan dari rumah ke rumah,



Foto 7.1. Gladi Tanggap Darurat Bencana Banjir – Program KBBM PMI Cabang Wajo, Sulawesi Selatan

dalam pertemuan atau rapat warga, pendampingan masyarakat secara perorangan maupun kelompok, serta dalam berbagai kesempatan.

Bagaimana Kurikulum serta Materi Pendidikan dan Pelatihan KSR dan Tim Sibat?

Kurikulum pendidikan dan pelatihan tingkat dasar untuk KSR Spesialis KBBM dan Tim Sibat mengacu pada kurikulum standar. Setelah KSR Spesialis KBBM dan Tim Sibat terbentuk, PMI Cabang dapat memberikan orientasi kepada mereka, khususnya yang terkait dengan organisasi kepalangmerahan,

visi dan misi PMI, ruang lingkup kegiatan PMI, serta ruang lingkup Program KBBM.

Kegiatan pelatihan lanjutan dapat berupa paket latihan rutin yang digunakan untuk memperdalam materi-materi tingkat dasar yang lebih mengarah pada terapan praktis, antara lain:

- Pengkajian Desa Partisipatif (PRA).
- Pemetaan Bahaya, Risiko dan Sumber Daya.
- Gladi/simulasi Tanggap Darurat Bencana.
- Sistem Peringatan Dini.
- *Baseline Survey* (survey data dasar yang biasa

No.	Jenjang	Jenis Pelatihan yang Diperlukan
1.	Pelatihan KSR PMI Cabang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen Bencana • Pelatihan Manajemen Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana • Pelatihan KBBM • Pelatihan Perencanaan Program KBBM (<i>Project Planning Process</i>) • Pelatihan Pemetaan Daerah Rawan Bencana secara Partisipatif • Pelatihan VCA/PRA
2.	Pelatihan Tim SIBAT	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan KBBM • Pelatihan Khusus (Muatan Lokal) sesuai dengan karakteristik Bahaya, Kerentanan dan Risiko. • Promosi Perilaku Sadar Bencana

No.	Jenis	Sasaran	Tempat Pelaksanaan	Penanggung Jawab/ Fasilitator/Pelatih
1.	Pelatihan KSR PMI Cabang	KSR, TSR	Markas PMI Cabang	PMI Pusat/ PMI Daerah/ PMI Cabang
2.	Pelatihan Tim Sibat	Tim Sibat	Kantor Kepala Desa/ Kelurahan	Tim Satgana
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Masyarakat	Di desa/kelurahan setempat (dari rumah ke rumah, tiap RT, RW maupun dalam forum pertemuan yang relevan).	Tim Sibat

dilakukan sebelum memulai kegiatan dalam sebuah program).

- Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat.
- Promosi Perilaku Sadar Bencana.
- Perencanaan Mitigasi.
- Proses Perencanaan dan Manajemen Program (*Logical Framework Approach* atau LFA).
- PIMES, dan materi teknis lain yang relevan.

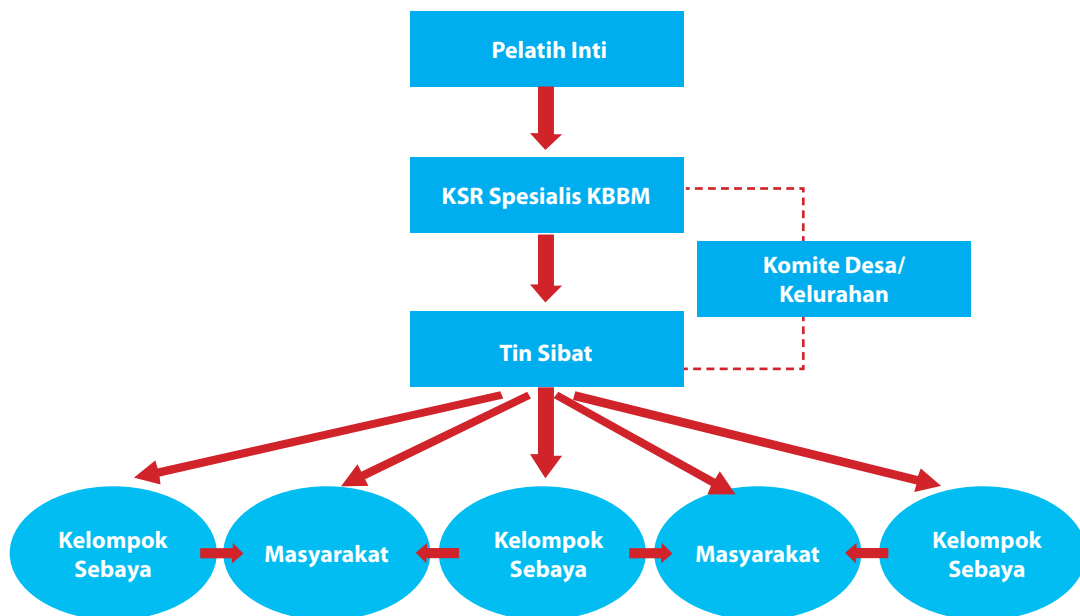
Sedangkan materi pengembangan yang dapat diberikan antara lain:

- Penyadaran Kesetaraan Gender.
- Penyadaran Sosial.
- Inisiatif Pemograman yang Lebih Baik atau *Better Programming Initiative* (BPI)
- Bagaimana meredam ketegangan sosial.
- Sistem monitoring dan evaluasi secara partisipatif.

Untuk menunjang tugas Tim Sibab dalam pemberdayaan masyarakat, PMI Cabang dengan dukungan PMI Pusat/Daerah menyediakan *media kit* seperti *booklet*, poster, buletin, pamflet, komik, dan lain-lain yang dapat digunakan secara efektif dalam sosialisasi, penyebaran, penyadaran, maupun pemberdayaan masyarakat. Material pendukung didesain dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, serta menggunakan warna, isi dan format yang sesuai dengan kondisi riil di masyarakat, hingga golongan yang pendidikannya rendah sekalipun dapat memahami.

Selama proses pendidikan dan pelatihan, PMI harus melibatkan pihak pemerintah maupun institusi yang terkait dalam pemberdayaan sesuai lingkup tugas masing-masing.

Alur Transformasi dan Pembelajaran KBBM



Bab VIII

Perencanaan Program KBBM Secara Partisipatif

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan mengapa perlu ada rencana kerja KBBM.
- Memahami tantangan/hambatan dalam memperkenalkan program mitigasi.
- Menjelaskan sejauhmana efektivitas Program KBBM terhadap semua tipe bencana.
- Memfasilitasi proses penyusunan rencana kerja KBBM.
- Menggambarkan secara umum cakupan rencana kerja KBBM.

Mengapa Perlu Ada Rencana Kerja KBBM?

Program KBBM memberikan perhatian yang besar pada upaya pemberdayaan masyarakat, dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya diharapkan masyarakat mampu menurunkan tingkat risiko dampak bencana yang terjadi di wilayahnya. Untuk mewujudkan hal itu, perlu disusun rencana yang matang. Penyusunan rencana kerja Program KBBM dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat sendiri. Bila masyarakat belum mampu melakukannya secara mandiri, KSR Spesialis KBBM dan Tim Sibat dapat menjadi fasilitator. Namun semua keputusan yang dihasilkan dan proses dalam perencanaan tersebut sepenuhnya harus dilakukan oleh masyarakat.

Pembuatan rencana Program KBBM dimaksudkan untuk:

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan risiko bencana yang terjadi di wilayahnya.
- Memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa mereka sebenarnya memiliki kapasitas dan sumber daya untuk melakukan

upaya-upaya pengurangan risiko terhadap dampak bencana.

- Mengidentifikasi warga masyarakat dalam kelompok rentan.
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan permasalahan yang perlu dipecahkan serta kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- Merumuskan dan merencanakan strategi melalui upaya-upaya struktural maupun non-struktural yang dapat mencegah, memitigasi, mempersiapkan dan merespon kejadian bencana.

Tim Sibat dan masyarakat di tingkat desa, mengambil peranan utama dalam melakukan *survey* VCA maupun PRA di lingkungannya. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja.

Ada dua tingkat dari perencanaan yang terkait dalam KBBM. Pertama, rencana kerja Program KBBM di tingkat masyarakat, kedua rencana Program KBBM di PMI Cabang yang penyusunannya melibatkan Komite Manajemen KBBM tingkat kabupaten maupun perwakilan dari Pemda.

Apa Tantangan/Hambatan dalam Memperkenalkan Mitigasi kepada Masyarakat?

Salah satu komponen pelaksanaan KBBM adalah program mitigasi bencana. Mitigasi bencana dimaksudkan untuk mengurangi dampak bencana alam baik melalui pelatihan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.

Melalui pemetaan dan analisis terhadap bahaya, risiko, dan sumber daya yang telah dilakukannya, maka Tim Satgana bersama Tim Sibata memfasilitasi proses diskusi dan curah pendapat dengan ma-

syarakat untuk mengidentifikasi dan membuat skala prioritas permasalahan dan kebutuhan yang membutuhkan pemecahan maupun pemenuhan.

Berdasarkan pengalaman dalam penggarapan Program KBBM, proses ini dapat menghadapi serangkaian tantangan/hambatan sebagai berikut:

- Masyarakat tidak menyetujui program karena adanya perbedaan persepsi tentang suatu masalah atau karena konflik kepentingan.
- Ada perbedaan persepsi yang mendasar tentang program mitigasi bencana dan tumpang tindih dengan program infrastruktur publik.

Contoh Program Mitigasi Fisik :

Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Pos Pertolongan Pertama • Pengadaan Pusat Pelayanan Kesehatan • Pencegahan Malaria • Pencegahan Demam Berdarah • Penyadaran Perilaku Hidup Sehat • Pembuatan MCK
Penghidupan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan sumber-sumber air bersih • Penyediaan air minum dan air bersih • Pembuatan sistem pembuangan sampah • Pembersihan saluran air • Pembuatan sistem saluran pembuangan air (drainase) • Pembuatan tanggul untuk perlindungan rumah, lahan pertanian maupun tambak ikan • Penampungan untuk perlindungan hewan ternak • Pembangunan sarana pengaman perahu nelayan dan perlengkapannya
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan bendungan pencegah banjir • Pembangunan tanggul pemecah ombak atau penanaman bakau. • Pengerukan sungai, danau atau kanal (karena pendangkalan) • Reboisasi atau penanaman kembali • Perlindungan terhadap erosi • Pembangunan permukiman berwawasan lingkungan atau berdasarkan upaya mitigasi bencana • Advokasi Kebijakan pemerintah dan penegakan hukum terhadap perusak hutan, dan lain-lain

Misalnya: Sangat sulit memutuskan apakah membuat sistem jalan atau jembatan gantung untuk pengembangan infrastruktur publik ataukah rute penting untuk evakuasi atau akses tim pertolongan dan penyelamatan saat terjadi bencana.

Dilema semacam itu seringkali ditemui saat membantu masyarakat dalam menilai dan memutuskan bentuk mitigasi apa yang akan dilaksanakan. Dalam kasus seperti ini, perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk mitigasi lain yang lebih relevan dan dapat dilaksanakan masyarakat. Lakukanlah diskusi dan analisis yang sungguh-sungguh dengan masyarakat dalam mengidentifikasi sarana kesiapsiagaan berjangka panjang.

Bagian dari pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat adalah fokus pada munculnya kesadaran terhadap situasi bahaya bencana. Berdasarkan hasil diskusi dengan warga masyarakat, rencana kerja KBBM biasanya memprioritaskan program mitigasi yang berorientasi pada bahaya yang relevan. Karena itu intervensi elite politik yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadinya menjadi hal yang bertentangan dengan tujuan program mitigasi yang sebenarnya. Selain itu, struktur mitigasi mungkin hanya relevan untuk pencegahan dalam jangka pendek bukan untuk jangka panjang.

Bentuk langkah-langkah upaya mitigasi/Pengurangan Risiko dapat dilihat pada lampiran Daftar Pilihan Tindakan Pengurangan Risiko Tingkat Desa pada halaman 66.

Apakah KBBM Efektif untuk Semua Jenis Bencana?

Komponen-komponen yang berbeda dapat dirapikan dalam situasi bencana yang berbeda-beda pula.

KBBM memusatkan perhatian pada jenis-jenis bahaya bencana yang berskala relatif kecil. Dalam

hal ini masyarakat dapat mengidentifikasi secara nyata dan melakukan sejumlah upaya mitigasi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatannya. Tidak terbayangkan bahwa KBBM dapat membangun pertahanan fisik terhadap bahaya bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain, sekalipun kemampuan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat dalam skala besar ini tidak pernah diperhitungkan.

Komponen utamanya adalah bagaimana Tim Sibot mampu membedakan tingkat ancaman dan jenis bencana yang terjadi di daerah masing-masing, misalnya melalui:

- Pembuatan sistem peringatan dini untuk masyarakat.
- Pelatihan masyarakat dalam hal kebutuhan respon dan prosedur evakuasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya tentang kegiatan-kegiatan respon bila terjadi ancaman bencana.
- Di daerah yang padat permukiman misalnya, Tim Sibot dapat membantu mitigasi jangka panjang terhadap sosialisasi tata rancang rumah yang tahan gempa.

Bagaimana Memfasilitasi Proses Perencanaan Program KBBM secara partisipatif ?

Proses perencanaan KBBM dimulai dengan penilaian situasi sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Proses ini akan menjadi awal bagi Tim Sibot dan masyarakat dalam merumuskan rencana kerja KBBM. Proses ini menekankan bahwa KSR Spesialis KBBM atau staf PMI hanya menempatkan diri sebagai fasilitator dan mendorong masyarakat memutuskan semuanya.

Tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan antara lain:

- Membuat analisis terpadu terhadap situasi bencana di masyarakat yang terfokus pada:

- Bahaya paling potensial dan paling mengancam yang sering dihadapi.
 - Tanda-tanda bahaya, termasuk juga riwayat, frekuensi, kegawatan, area, dan masyarakat yang terkena dampak.
 - Kelompok rentan di masyarakat.
 - Kondisi warga dan kehidupan kemasyarakatan yang membuat warga sangat rentan.
 - Kejadian/upaya-upaya respon yang pernah dilaksanakan selama bencana dan alternatif-alternatif lain yang memungkinkan.
 - Sumber daya masyarakat yang dapat digerakkan dalam penanggulangan bencana.
 - Dinas/organisasi/lembaga/institusi serta mitra lain yang membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan permasalahan atau isu. Dalam membuat analisis masalah dan dalam memprioritaskannya, hal-hal berikut dapat digunakan sebagai kriteria:
 - Besar kecilnya masalah, penyebaran, dan perluasan efek atau dampak hilangnya nyawa dan harta benda.
 - Keseriusan masalah yang sangat penting sehingga meminta respon segera, seperti epidemik.
 - Frekuensi kejadian, apa yang sering muncul dan menyebabkan dampak bagi warga masyarakat.
 - Akar masalah yang menyebabkan serangkaian masalah lainnya menjadi sasaran pemecahan utama, seperti pembuangan limbah, kesulitan akses air bersih saat banjir, sekolah yang berada di area banjir yang terkontaminasi banyak sumber penyakit, dan lain-lain.
 - Kemampuan manajemen–penyelesaian masalah harus terkait dengan kapasitas masyarakat untuk mengelola dan memuktuskan sendiri upaya pemecahan masalah tersebut. Masyarakat tidak dapat mencegah angin puyuh, namun dapat membangun suplai air bersih, membuat sarana evakuasi, sistem pengenalan dini, dan rencana evakuasi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang paling rentan.
 - Menyusun tujuan.
 - Mengidentifikasi strategi dan aktivitas yang dapat merespon masalah yang diprioritaskan. Misalnya:
 - Rencana evakuasi
 - Sistem pengenalan dini
 - Pembangunan sistem air bersih
 - Memindahkan sekolah ke tempat yang lebih aman
 - Mengidentifikasi area perumahan yang aman untuk permukiman masyarakat yang wilayahnya paling berisiko.
 - Pembuatan tanggul sungai
 - Reboisasi
 - Penanaman bakau, dan lain-lain
 - Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas
 - Menyusun kerangka waktu perencanaan.
- Mungkin satu dua, atau tiga kegiatan diprioritaskan dalam rencana kerja KBBM. Kegiatan lain yang juga diidentifikasi dapat dilaksanakan di masa datang. Dukungan teknis dari PMI dan Pemda sangat diperlukan dalam hal bantuan dokumentasi dan penyusunan rencana. Konsep awal dapat dituliskan dan dipresentasikan pada pertemuan warga untuk disyahkan. Tim Sibap perlu merumuskan rencana kerja KBBM tersebut serta meminta semua unsur perangkat desa/kelurahan dan para tokoh masyarakat membahasnya. Sehingga rencana tersebut dapat menjadi bagian rencana pembangunan

desa/kelurahan. Selanjutnya perangkat desa/kelurahan mengajukan rencana tersebut ke pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, maupun instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, maupun BPBD di tingkat kabupaten/kota untuk mengintegrasikannya dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.

Bagaimana Gambaran Umum Rencana Kerja KBBM?

Rencana kerja KBBM yang baik seyogyanya mengandung upaya dan pemecahan masalah yang sangat mendesak namun keberadaannya dapat meningkatkan kehidupan selanjutnya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang kebetulan tidak menempati prioritas utama tetap diperhatikan dan diupayakan pelaksanaannya di tahun-tahun mendatang, mengingat tidak semua kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek.

Sebuah rencana kerja tidak hanya ditujukan untuk program-program pembangunan infrastruktur fisik, seperti pusat penampungan darurat dan penanaman pohon bakau. Namun termasuk juga pendidikan, pelatihan, upaya-upaya penyadaran masyarakat, serta peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Rencana kerja lain dapat mencakup upaya mitigasi yang terkait dengan masalah kesehatan, seperti penyediaan suplai air bersih saat banjir, dan lain-lain.

Contoh Rencana Kerja:

Problem	Tujuan	Aktivitas/ Strategi	Sumber Daya yang Diperlukan	Penanggung Jawab	Kerangka Waktu
Kurangnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir	Kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat yang rentan di kawasan banjir dapat ditingkatkan	<p>Penyadaran tentang bahaya dan risiko banjir</p> <p>Pelatihan kesiapsiagaan bencana banjir</p> <p>Simulasi tanggap darurat penanggulangan bencana banjir</p>	Fasilitator Materi Pelatihan Media Peraga Dana	KSR Spesialis KBBM Tim Sibat BPBD Kab/Kota	11 – 13 September 2007
Kurangnya pengetahuan tentang manajemen cara evakuasi	Warga masyarakat akan dilatih Manajemen Evakuasi Bencana Banjir	Warga masyarakat akan dilatih dalam hal Manajemen Evakuasi Bencana Banjir	Melaksanakan pelatihan Manajemen Evakuasi Bencana Banjir	Fasilitator Materi Pelatihan Media Peraga Dana	16 – 30 Oktober 2007
Hilangnya jiwa dan harta benda karena bencana banjir	Masyarakat di sekitar bantaran sungai yang rentan terhadap banjir akan aman dari dampak bencana banjir	Pembangunan pusat penampungan darurat di area yang lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Batu, pasir, semen, kayu, besi cor, dan material lainnya. • Dana • Tenaga kerja dari masyarakat 	Dinas Pekerjaan Umum Tim Sibat Aparat Desa/ Kelurahan Koordinator KBBM Cabang	1 Agustus – 21 September 2007
Masyarakat sangat terancam dengan meluapnya air banjir	Tingkat kerusakan rumah dan infrastruktur atau fasilitas publik dapat dikurangi	Pembangunan tanggul pengaman banjir di bantaran sungai yang rawan luapan banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Batu, pasir, semen, kayu, besi cor, dan material lainnya. • Dana • Tenaga kerja dari masyarakat 	Dinas PU, Tim Sibat, Aparat Desa / kelurahan Koordinator KBBM Cabang	3 Februari – 23 Juli 2008
Masyarakat terjerat oleh tengkulak	Menumbuhkan produktivitas ekonomi	Advokasi/lobby ke Pemda/ DPRD dan Dinas Koperasi dan KUK untuk rencana pendirian Koperasi atau Bantuan Modal	Tim Sibat Camat, Kepala Desa/ Lurah	Pengurus PMI Cabang, Camat, Kepala Desa/ Lurah	15 Januari 2008. 15 Jan – Maret 2008

Bab IX

Pelaksanaan Program KBBM

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan apa yang dilakukan setelah Rencana kerja KBBM dirumuskan.
- Mengadvokasi kepada pemerintah tentang peranannya dalam implementasi Program KBBM.
- Memonitor Program KBBM.
- Mengevaluasi Program KBBM.
- Menjelaskan apa saja indikator keberhasilan Program KBBM.

Apa yang Dilakukan setelah Rencana Kerja KBBM Dirumuskan?

Dalam proses penyusunan rencana kerja Program KBBM, KSR Spesialis KBBM dan Tim Sibat memegang peran penting sebagai fasilitator. Rencana Kerja KBBM yang telah dirumuskan masyarakat bersama perangkat desa atau kelurahan yang difasilitasi PMI diajukan ke Pemda kabupaten/kota dan DPRD. Dengan demikian diharapkan rencana tersebut dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota sehingga dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan.

Kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan antara lain:

- **Mengintegrasikan Rencana Kerja KBBM dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.**

Pemerintah desa/kelurahan membuat pernyataan pengajuan ke Pemda setempat agar mengintegrasikan Rencana Kerja KBBM dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota, berupa:

- Rencana investasi tahunan untuk alokasi anggaran tahunan.
- Rencana Umum Pembangunan Kabupaten/Kota untuk jangka panjang.

Selanjutnya, perangkat desa/kelurahan dan Tim Sibat mengadakan pertemuan dengan Walikota/Bupati/DPRD untuk mendiskusikan bagaimana Rencana Kerja KBBM tersebut dapat diadopsi dan diintegrasikan ke dalam Rencana Umum Pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Pengurus PMI Cabang dan KSR Spesialis KBBM dapat memfasilitasi pertemuan tersebut.

- **Pengembangan pembelajaran teknis untuk program mitigasi secara partisipatif**

Salah satu tugas Pemda adalah memberikan bantuan teknis dalam pengembangan rencana program mitigasi berupa desain konstruksi, spesifikasi rinci, perhitungan anggaran dan sebagainya. Tenaga teknis dari Pemda maupun Dinas Pekerjaan Umum (PU) seperti perencana anggaran dan tenaga teknis dalam hal ini bertugas sebagai mobilisator.

Agar prosesnya partisipatif, desain program hendaknya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Tim Sibat secara berkala akan berkonsultasi dengan staf Pemda dalam pengerjaan rencana teknis.

Warga masyarakat dapat menyediakan banyak informasi dan sumber daya yang dapat membantu penyelesaian desain program mitigasi.



Foto 9.1. Mitigasi struktural pembuatan tiang pancang penahan eceng gondok, Kelurahan Laelo, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan

Pertemuan dengan warga dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh warga peduli pada pengembangan program dan akan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan program mitigasi.

- **Pengadaan sumber daya untuk pelaksanaan program.**

Sejak Program KBBM dicanangkan, diharapkan ada-nya dukungan dan kemitraan dengan Pemda dalam penyediaan anggaran. Program KBBM ini bukan program PMI atau masyarakat semata namun juga program milik Pemda. Sehingga rencana kerja KBBM harus masuk dalam master plan (kerangka dasar) pembangunan kabupaten/kota. Sekaligus dimasukkan dalam APBD sebagai tanda bahwa anggaran untuk program telah disetujui.

Sumber-sumber lain yang dapat digali bersama untuk mendapatkan pendanaan antara lain:

- Dana Pembangunan Desa/Kelurahan
- Dana Pembangunan Kecamatan
- Dana Pembangunan Kabupaten
- Dana Pembangunan Provinsi
- Usulan Dana kepada DPRD II (Kabupaten)
- Dinas/lembaga/institusi pemerintah lainnya

- LSM/institusi lainnya
- Perusahaan Swasta
- Iuran dari masyarakat setempat
- Donatur perorangan/kelompok
- Penggalangan dana yang dilakukan PMI Cabang, KSR Spesialis KBBM, Tim Sibab, perangkat desa/kelurahan dan masyarakat setempat.

- **Mobilisasi KSR dan Tim Sibab**

KBBM adalah program yang didasari oleh kerelawanan. Tulang punggung program ini adalah relawan PMI yang terkait langsung dengan kegiatan kesiapsiagaan bencana yakni para anggota KSR Spesialis KBBM dan Tim Sibab.

KSR Spesialis KBBM yang dibentuk di PMI Cabang diharapkan dapat memainkan peranan utama dalam memobilisasi Tim Sibab. Selanjutnya Tim Sibab langsung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan setempat, baik kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan/pelatihan maupun upaya-upaya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana.

Dalam situasi darurat atau saat diperlukan keberadaannya, KSR Spesialis KBBM dapat membantu Tim Sibab untuk menggerakkan masyarakat.

- **Mobilisasi masyarakat**

Kunci utama keberhasilan Program KBBM adalah bagaimana warga masyarakat dapat digerakkan secara penuh dan partisipatif dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan. Keberadaan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sangat menentukan. Masyarakat tidak hanya memberikan dukungan pemikiran, waktu dan tenaganya, namun juga material yang dimilikinya.

Melalui prinsip-prinsip dan pendekatan KBBM masyarakat dapat diorganisasi dan digerakkan. Tim Sibat menempati posisi kunci dalam pelaksanaan Program KBBM. Juga, tidak kalah penting adalah menumbuhkan semangat kegotongroyongan atau bekerja untuk kepentingan bersama dan saling membantu mereka yang membutuhkan.

Kerangka waktu atau jadwal kegiatan harus direncanakan bersama masyarakat dan perangkat desa/kelurahan. Seluruh warga diharapkan dapat berpartisipasi secara optimal dalam pelaksanaan Program KBBM. Jika diperlukan, masyarakat dapat dibekali dengan berbagai ketrampilan yang mendukung pelaksanaan suatu program mitigasi.

Ada dua kelompok tenaga yang dapat digerakkan, yaitu:

1. Tenaga kerja yang memiliki ketrampilan tertentu. Mereka mendapatkan upah sesuai keampilannya, seperti teknisi bangunan, ahli air dan sanitasi, konsultan dan lain-lain.
2. Masyarakat umum yang bekerja secara bergotong royong. Mereka bekerja karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga. Mereka tidak digaji namun mendapatkan makanan yang telah dialokasikan oleh anggaran maupun disediakan secara swadaya oleh masyarakat.

Dalam menggerakkan masyarakat, khususnya dalam program mitigasi fisik (struktural), Tim Sibat dapat mengorganisir mereka berdasarkan waktu luang yang mereka miliki. Mereka dapat digerakkan per hari, per RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga).

Misalnya: Warga Desa Sepabatu memiliki 7 RT. Setiap RT diwajibkan waktu bekerja dua kali dalam 1 minggu, 1 hari, maupun 1 minggu dengan mengikuti contoh jadwal kerja seperti tabel dibawah.

Penjadwalan waktu dan konsekuensi jika ada warga yang berhalangan dalam kegiatan gotong royong ini harus dibicarakan bersama, sehingga semua warga memberikan kontribusinya.

Tim Sibat bertanggung jawab atas upaya-upaya pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Termasuk mengecek kehadiran warga, mutu kerja dan kejadian-kejadian khusus atau perkembangannya.

- **Peresmian Program**

Program mitigasi diharapkan dapat diselesaikan warga dapat dengan hasil yang baik. Setelah program selesai, acara peresmian dilakukan secara sederhana. Saat-saat seperti ini sebaiknya digunakan untuk memantapkan komitmen warga masyarakat agar menjaga dan merawat hasil program dengan sebaik-baiknya. Bagaimana pengelolaan sarana

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	RT 6	RT 7

Atau

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
RT 1 dan RT 2	RT 3 dan RT 4	RT 5 dan RT 6	RT 7	RT 1 dan RT 2	RT 3 dan RT 4	RT 5 dan RT 6

fisik yang selesai bangun harus didiskusikan oleh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan.

Apa Peranan Pemda selama Pelaksanaan Program KBBM?

Salah satu upaya positif Program KBBM adalah mengembangkan kapasitas Pemda. Staf Pemda yang terkait dengan tugas penanganan bencana harus dilatih dalam melaksanakan program ini.

Seperti halnya staf PMI, staf Pemda memberikan bantuan teknis kepada masyarakat dalam melaksanakan program mitigasi bencana. Peranan umum Pemda adalah sebagai berikut:

- Mengalokasikan anggaran KBBM dalam APBD dengan mengikuti prosedur anggaran yang berlaku.
- Pengadaan material.
- Penggunaan alat-alat berat
- Bantuan teknis supervisi terhadap pelaksanaan program.

- Koordinasi dengan PMI Cabang, pemerintah desa/kelurahan, maupun Tim Sibab dalam menggerakkan masyarakat.

Bagaimana Memonitor dan Mengevaluasi KBBM?

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen yang terintegrasi dalam pengembangan program. Proses ini tercermin dalam materi PIMES pada Bab II buku ini. Monitoring adalah upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam menentukan status pelaksanaan program melalui pengumpulan data, analisis, dan perumusan sumber-sumber alternatif kegiatan untuk memastikan program berlangsung dengan baik.

Tahap-tahap yang dapat dilaksanakan antara lain :

- Berbasis pada rencana. Tentukan hal-hal yang akan dimonitor bila program mitigasi bencana dilaksanakan.
- Menentukan siapa penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program. Bila Tim Satgas, Tim Sibab, Pemda, PMI, maupun masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program, siapa yang akan mengkoordinir dan menetapkan peran dan tugas masing-masing.

Hal-hal yang dimonitor	Penanggung jawab	Metodologi	Frekuensi
Penerimaan dan pengeluaran dana	Manajer Program Pemda	Konsultasi dengan staf anggaran	Dilakukan berkala sesuai rencana jadwal
Pengadaan material	Tim Sibab Bagian Pengadaan Material	Pemantauan saat pengadaan material	Setiap waktu saat material diadakan.
Jadwal kerja	Manajer Program Pemda	Pemantauan langsung saat pelaksanaan sampai berakhirnya program.	Harian
Pekerja dan relawan	Tim Sibab	Mendata kehadiran dan memantau pelaksanaan tugas dan peran masing-masing.	Harian

- Menentukan bagaimana dan kapan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan.

Skema sederhana untuk monitoring pelaksanaan program mitigasi dicontohkan pada tabel halaman 62:

Penyelesaian Program

Evaluasi adalah pembelajaran yang sistematis tentang bagaimana program dilaksanakan, dari awal hingga selesai, dan apa dampak yang telah dihasilkan. Hal-hal dasar yang dievaluasi dalam Program KBBM, mencakup:

Sumber-sumber Program (*Input*):

- Kuantitas atau jumlah masukan mencakup dana, material, perlengkapan/logistik, sumber daya manusia (tenaga), dan sebagainya.
- Sumber-sumber masukan.
- Kualitas masukan.

Proses:

- Aktivitas yang telah dilaksanakan dari awal hingga akhir.
- Efektivitas strategi.
- Masalah yang ditemui dan solusi pemecahannya.
- Jadwal.
- Partisipasi dari berbagai sektor.

Hasil yang dicapai (*Output*):

- Pencapaian tujuan.
- Variasi dari hasil yang diharapkan.
- Manfaat yang dirasakan dari program
- Masalah-masalah yang muncul dari program
- Pembelajaran yang bisa dipetik dari program

Melalui metode partisipatif, Komite Manajemen KBBM di tingkat PMI Cabang, KSR Spesialis KBBM, Tim Sibat, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat dapat menggambarkan mekanisme bagaimana mengevaluasi program secara kolektif.

Apa Saja Indikator Keberhasilan Program KBBM?

Berdasarkan pengalaman, ada perubahan mendasar yang dihasilkan oleh Program KBBM dalam berbagai tingkatan yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan KBBM.

Masyarakat:

- Dampak bahaya bencana yang terjadi di masyarakat dapat dimitigasi (tidak hanya untuk jangka pendek, namun juga jangka panjang).
- Tim Sibat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
- Warga masyarakat setempat terlibat secara penuh dalam aktivitas KBBM.
- Perangkat desa dan staf Kantor Desa/Kelurahan mendukung Tim Sibat atas dasar keberlangsungan dalam mengintegrasikan Rencana Kerja KBBM ke dalam Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan.
- Anggaran dialokasikan oleh pemerintah desa/kelurahan untuk kegiatan atau program yang berkaitan dengan KBBM.
- Tokoh masyarakat mampu menggunakan sumber-sumber daya setempat untuk melaksanakan kegiatan KBBM.
- Masyarakat mampu mengelola kegiatan tanggap darurat bencana saat terjadi bencana di wilayahnya, meliputi pertolongan dan penyelamatan, distribusi bantuan, evakuasi, serta bantuan pengadaan pelayanan medis dan psikososial.
- Warga mampu menganalisis situasi dan respon bencana di masyarakat.
- Warga memiliki sikap positif terhadap PMI.

Pemda:

- Tim Sibat diorganisasikan dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- BPBD tingkat Kabupaten/Kota lebih aktif.
- Rencana Kerja KBBM diintegrasikan ke dalam

Rencana Pembangunan Kabupaten maupun rencana penggunaan lahan.

- Peta Tingkat Bahaya, Risiko, dan Kerentanan di kawasan percontohan Program KBBM diintegrasikan dalam peta kabupaten untuk referensi penanggulangan bencana.
- Dana telah dialokasi untuk Program KBBM.
- Pemda mampu memberikan pelatihan di luar wilayah percontohan Program KBBM.
- Pemda mampu menggunakan sumber-sumber eksternal untuk program mitigasi bencana.
- Program pengembangan Pemda memperhatikan wilayah yang rawan bencana.
- Staf Pemda dapat mengelola situasi darurat atau saat terjadi bencana dalam hal operasi pertolongan dan penyelamatan, pengadaan bantuan, evakuasi, pengadaan pelayanan medis, dan psikososial.
- Mampu mendokumentasikan situasi bencana dan respon.

Palang Merah Indonesia:

- PMI memiliki KSR Spesialis KBBM yang dapat mengorganisasi Program KBBM.
- Mampu memberikan pelatihan tentang KBBM.
- Staf mampu mengorganisasikan aktivitas KBBM di masyarakat.
- Memiliki hubungan baik dengan Pemda dan mitra lainnya.
- Mampu mengelola sumber-sumber daya untuk Program KBBM.
- Mampu mengalokasikan material dan peralatan untuk KBBM.
- Mampu mendokumentasikan kejadian bencana dan tindakan-tindakan respon yang telah dilakukan.

Bab X

Menjaga Keberlanjutan Program KBBM

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita diharapkan mampu:

- Menjelaskan bagaimana PMI Daerah/Cabang mendorong pemerintah daerah dan DPRD agar mendukung Program KBBM
- Mengadvokasi masyarakat dan pemerintah daerah bagaimana menjaga kesinambungan Program KBBM
- Memahami seberapa penting aspek kerelawanan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan Program KBBM
- Melakukan pembinaan jiwa kerelawanan dalam masyarakat
- Melakukan pendekatan manajemen yang dapat mendorong keberlangsungan Program KBBM
- Melembagakan Program KBBM di masyarakat
- Mengadvokasi pemerintah daerah/BPBD agar melembagakan Program KBBM dalam kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya

Bagaimana PMI Daerah/Cabang Mendorong Pemda dan DPRD agar Mendukung Program KBBM?

Pada tingkat masyarakat, PMI Daerah/Cabang dapat mensosialisasikan dan mengadvokasi Pemda kabupaten agar memainkan peranan utama dalam Program KBBM yang akan dilaksanakan di wilayah rawan bencana di daerahnya. Tim Sibot dan pemerintah desa/kelurahan membantu PMI Cabang meyakinkan Pemda maupun DPRD untuk memberikan dukungannya.

Tantangan utama PMI Daerah/Cabang adalah melanjutkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemda/DPRD melalui sistem politik yang berlaku. Secara politis, kemitraan dengan Pemda dan DPRD menentukan pelaksanaan dan keberlangsungan Program KBBM. Desentralisasi dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan upaya pengembangan/pem-

angunan daerah akan menciptakan kondisi yang baik untuk pelaksanaan Program KBBM.

Melanjutkan komunikasi, koordinasi, negosiasi dan advokasi dengan staf Pemda merupakan bagian yang terintegrasi dalam upaya menjaga keberlangsungan Program KBBM. Permasalahan dan kebutuhan yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana, yang diperoleh dari hasil VCA, PRA, maupun *Baseline Survey*, harus diupayakan perubahan, pemecahan masalah, maupun pemenuhan kebutuhannya melalui proses pemberdayaan dan upaya-upaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan untuk sekarang dan masa datang. Proses pemberdayaan kapasitas dalam upaya penanggulangan bencana ini berbasiskan sumber daya dan sistem kepemimpinan di masyarakat setempat, tanpa adanya kepentingan pribadi maupun politik tertentu. Sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Bagaimana Menjaga Kestinambungan Program KBBM?

Faktor-faktor berikut ini telah diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi kestinambungan program. Antara lain partisipasi dan kepemilikan oleh masyarakat setempat, organisasi dan manajemen, keuangan, kesetaraan gender dan budaya.

Partisipasi dan Kepemilikan oleh warga masyarakat setempat

Selama tahap persiapan, Program KBBM dititikberatkan pada keterlibatan para mitra dalam mendukung upaya keikutsertaan dan kepemilikan. Di PMI pusat, sebuah Komite Manajemen KBBM telah dibentuk. Anggota komite turut memberikan kontribusi terhadap rancangan Program. Sasaran serta *output* telah dirumuskan di dalam lokakarya perencanaan yang diikuti para mitra terkait. Di dalam masyarakat, berbagai permasalahan telah diidentifikasi dan diberi prioritas melalui proses partisipatif. Kepemilikan atas suatu kegiatan program tertentu akan diberikan kepada masyarakat, dan bilamana mungkin, tenaga-tenaga ahli setempat dan berbagai sumber yang tersedia akan dimanfaatkan.

Kestinambungan Organisasi

Berlangsungnya pengembangan organisasi PMI akan dikoordinasikan oleh Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC). Program ini dibangun berdasarkan struktur organisasi dan sumber daya manusia di PMI serta bertujuan memperkuat struktur dan sumber-sumber tersebut seiring dengan keseluruhan rencana pengembangan organisasi yang telah disepakati. Tidak akan ada struktur yang bersifat paralel. Staf PMI yang bekerja untuk program ini akan memperoleh dukungan dana sesuai dengan standar kepegawaian PMI. Staf PMI akan didukung melalui pelatihan/pendidikan lanjutan dan cara-cara yang diperlukan telah diidentifikasi guna menjaga agar para

staf yang terlatih tetap termotivasi dan senantiasa berada di dalam organisasi. Program ini akan bersifat terbatas, khususnya dalam tahap percontohan (*pilot*), dengan tujuan agar PMI dapat belajar dan akhirnya terbiasa dengan konsep dan pendekatan baru tersebut dan dapat mengintegrasikan kegiatan Program KBBM ke dalam kegiatan-kegiatan kepalangmerahan lainnya di setiap tingkatan organisasi.

Di pusat, Komite Manajemen Program KBBM terdiri dari berbagai divisi dan unit, yang mengupayakan berlangsungnya koordinasi dan kolaborasi di Markas Kantor PMI Pusat. Demikian pula di tingkat daerah dan cabang, Komite Manajemen Program KBBM yang bersifat multi-sektoral telah dibentuk, yang berfungsi merangsang terbentuknya sikap kepemilikan bagi masyarakat setempat dan kestinambungan organisasi berjangka panjang.

Lokakarya dan magang di berbagai aspek kegiatan kesiapsiagaan bencana untuk setiap tingkatan dilaksanakan guna membangun kapasitas PMI dalam melaksanakan Program KBBM di masa datang. Pengembangan Pedoman Program KBBM serta kurikulum pelatihannya akan dikoordinasikan bersama Unit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta diintegrasikan dengan materi-materi pelatihan lainnya.

Keberlanjutan Keuangan

Bekerja sama dengan Federasi, Program KBBM mendukung upaya pengembangan strategi penggalangan dana PMI, termasuk pula advokasi terhadap pemerintah dalam mendukung penanganan bencana. Diharapkan Pemda, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, akan memberikan dukungan dana terhadap pelaksanaan program. Dengan kata lain, berbagi beban pendanaan untuk membiayai pelaksanaan upaya mitigasi. Program ini akan memperkuat kapasitas pengurus PMI Daerah dan Cabang, khususnya dalam hal penggalangan dana melalui pelatihan dan kampanye.

Seluruh fasilitas pendukung atau pengadaan peralatan guna mendukung aktivitas program didasarkan pada standar setempat dengan mempertimbangkan kapasitas PMI dalam menjaga dan memelihara perangkat tersebut. Diharapkan di masa mendatang, Pemda, PMI, dan kelompok masyarakat akan mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab kegiatan-kegiatan penanganan bencana di wilayah-wilayah program.

Seberapa Penting Aspek Kerelawanan Masyarakat dalam menjaga Keberlanjutan Program KBBM?

Salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberlanjutan Program KBBM adalah dimensi sosial. Terutama keinginan dan komitmen masyarakat yang bekerja dengan semangat kerelawanan untuk kesuksesan program. Prasyarat terhadap faktor ini sangat mendukung keberadaan Tim Sibat maupun KSR Spesialis KBBM. Mereka membutuhkan tindak lanjut pelatihan dan rekrutmen anggota baru. Tanpa upaya pembinaan terhadap Tim Sibat dan KSR Spesialis KBBM, Program KBBM tidak akan berhasil dengan baik.

Bagaimana Pembinaan untuk Meningkatkan Jiwa Kerelawanan?

Beberapa kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan PMI Cabang dan KSR Spesialis KBBM terhadap anggota Tim Sibat dan warga masyarakat antara lain:

- Memberikan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan.
- Memantapkan motivasi.
- Memberi pengakuan dan penghargaan secara proporsional.
- Meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk di dalamnya meningkatkan rasa percaya diri melalui pelatihan.

- Membimbing mereka agar mampu bekerja sama dengan masyarakat.
- Memantapkan kedudukan mereka dalam masyarakat.
- Membantu mereka mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi.
- Mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan berinisiatif tinggi, dengan harapan mereka menjadi pembawa pembaruan bagi desa/kelurahannya.
- Pendampingan
- Kunjungan silaturahmi.
- Kunjungan anjingsana terhadap masyarakat yang tertimpa musibah.

Bagaimana Model Pendekatan Manajemen yang Diperlukan untuk Keberlangsungan Program KBBM?

Kekuatan Program KBBM adalah menerapkan pendekatan manajemen desentralisasi. Mendelegasikan tanggung jawab kepada para pelaksana setempat dapat mendorong terwujudnya itikad baik masyarakat dan para pelaksana di desa/kelurahan setempat untuk mengupayakan keberlangsungan program.

Rencana di tingkat desa dirumuskan menjadi rancangan (*draft*) awal proposal. Draft Proposal ini dibawa ke PMI Cabang untuk diperiksa ulang. Proposal ini menjadi bagian dari Program Kerja KBBM tingkat PMI Cabang. Tim pelaksana di lapangan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola keuangan program mitigasi, sehingga operasional di lapangan semakin mudah dan menghindari sistem birokrasi yang terlalu kaku dan sulit diterapkan.

Proses dan hasil monitoring akan dilaksanakan oleh Staf KBBM PMI Pusat. Bila monitoring dan program menunjukkan kecenderungan adanya suatu masalah atau penyimpangan, staf pelaksana

bertemu langsung dengan PMI Daerah, PMI Cabang, KSR Spesialis KBBM, Tim Sibab, maupun perwakilan masyarakat dan Pemda untuk membahas dan memecahkan permasalahan dengan berlandaskan rencana program dan anggaran.

Sistem ini dapat menumbuhkan rasa memiliki dari semua elemen pelaksana dan masyarakat untuk saling membantu memperkuat kapasitas manajemen program.

Bagaimana Melembagakan Program KBBM?

Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bahaya dan risiko bencana harus menjadi standar pendekatan PMI Daerah/Cabang maupun semua unsur pelaksana dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan Program KBBM.

Upaya ini tampaknya revolusioner namun harus dioptimalkan realisasinya untuk mendorong terwujudnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana. Pendekatan manajemen bencana yang sekarang akan kita lakukan adalah bagaimana menggerakkan manajemen bencana yang tidak hanya terfokus pada pelayanan tanggap darurat bencana, namun juga memprioritaskan Pendekatan KBBM melalui kesiapsiagaan dan mitigasi dampak bencana. Ini berarti memperluas pelayanan yang mencakup pemetaan bahaya, risiko dan sumber daya, pengembangan masyarakat, pelatihan, advokasi, dan pengembangan infrastruktur sebagai program mitigasi terhadap dampak bencana. Perluasan pelayanan manajemen bencana berimplikasi pada pengembangan kapasitas PMI Daerah/Cabang, Pemda, maupun masyarakat setempat.

Dari pengalaman pelaksanaan Program KBBM di negara-negara lain, partisipasi organisasi palang merah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota meningkatkan pelaksanaan pelayanan penanganan bencana. Tidak hanya pada saat bencana terjadi,

namun juga untuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Ketrampilan-ketrampilan baru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas PSK semua elemen pelaksana dan yang menerima manfaat, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur masyarakat yang difokuskan untuk memitigasi tingkat risiko/bahaya bencana. Lebih dari itu, juga membina kapasitas lembaga melalui perumusan sistem dan prosedur kemitraan dengan masyarakat.

Pelembagaan Program KBBM dapat juga dilakukan melalui:

- Memperkuat kapasitas PMI di semua tingkatan dan jajaran, khususnya kapasitas dalam KBBM.
- Meningkatkan kemampuan PMI dalam hal pengorganisasian masyarakat atau cara-cara bekerja dengan masyarakat.
- Keberhasilan Program KBBM sangat tergantung pada kemampuan, ketrampilan dan komitmen para pengurus, staf, dan relawan PMI. Melalui pemahaman tentang sebab-sebab, tanda-tanda, dan akibat-akibat bencana, serta cara-cara mengorganisasikan masyarakat, akan menjadi modal dasar dalam penyadaran masyarakat serta upaya-upaya memitigasi dampak yang ditimbulkan.
- Struktur KBBM harus mengakar dan melembaga sampai pada Seksi/Bagian/Divisi di PMI Cabang, Daerah, maupun Pusat. Struktur ini akan melengkapi dan memperluas pelayanan PMI dengan membentuk sub-seksi, sub-bagian maupun sub-divisi baru.
- KBBM harus menjadi kebijakan pembangunan di pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan. Selain itu, program ini

harus diprioritaskan dalam rencana kerja pembangunan dengan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

- Pendekatan Program KBBM menjadi model bagi pengembangan masyarakat yang berbasis sumber daya masyarakat setempat. Pembangunan yang dilaksanakan di tingkat propinsi sampai desa/kelurahan memperhatikan aspek-aspek perlindungan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.
- Selain sebagai masukan, Program KBBM harus menjadi kebijakan PMI di semua jajaran dan masuk dalam program yang diprioritaskan dalam rencana strategi pengembangan PMI.
- Program KBBM, khususnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bahaya/risiko bencana, harus terintegrasi dengan program-program lainnya. Dalam waktu yang sama, program CBFA, pelayanan kesehatan, diseminasi/komunikasi, dan sebagainya yang terkait dengan penyadaran masyarakat dapat dilaksanakan dan diintegrasikan.
- Di tingkat masyarakat dan Pemda, kerja sama dengan sistem administrasi dan politik harus dimulai sejak awal. Pemda mendukung dana ataupun sumber daya manusia dengan menugaskan staf teknisnya di PMI Cabang/Daerah untuk membantu pelaksanaan fungsi Program KBBM atau pelayanan kesehatan.
- KBBM adalah cara yang tepat untuk menurunkan dampak bencana dalam skala kecil. Namun elemen pendekatan dan strateginya juga dapat diadopsi untuk menurunkan dampak bencana dalam skala besar.

**Daftar Pilihan
Tindakan Pengurangan Risiko Tingkat Desa**

No.	Langkah Pengurangan Risiko	Keterangan/ Tujuan	Struktural/ Non-struktural	Ancaman
Persediaan air rumah tangga, sanitasi dan kesehatan				
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sumber-sumber (air tanah atau sumur) • Sumber-sumber air masyarakat (air tanah/sumur/gudang air) di lokasi yang aman • Memperbaiki penampungan air hujan di perumahan (untuk digunakan pada musim hujan) 	Mempermudah diperolehnya air bersih atau air minum	Struktural	Banjir Epidemi
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Alat penyaring air rumah tangga (yaitu penyaring berbentuk mangkok dari bahan keramik) • Penanaman kembali tanaman sumber kayu bakar (kayu untuk memasak air) misalnya akasia • Kompor hemat bahan bakar 	Pengelolaan air – menghasilkan air minum yang aman		
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penampungan air minum (jerigen plastik/tong) 	Penampungan air minum – pengelolaan air minum yang aman		
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan tablet penjernih air • Penyediaan tawas (untuk pengendapan) 	Pengelolaan air minum pada masa darurat	Non-Struktural	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Titik air untuk keperluan rumah tangga atau masyarakat (mata air/sumur) • Kolam keluarga atau masyarakat • Mendayagunakan sarana penampungan air hujan (digunakan saat musim kering) 	Meningkatkan akses pada sumber air	Struktural	Kekeringan Epidemi
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Alat penyaring air rumah tangga (yaitu penyaring berbentuk mangkok dari bahan keramik) • Penanaman kembali tanaman sumber kayu bakar (kayu untuk memasak air) misalnya akasia • Ketel (untuk merebus air minum) 	Pengelolaan air – menghasilkan air minum yang aman		

No.	Langkah Pengurangan Risiko	Keterangan/ Tujuan	Struktural/ Non-struktural	Ancaman
7.	<ul style="list-style-type: none"> Alat penampungan air minum (jerigen plastik/tong) 	Penampungan air minum – pengelolaan air minum yang aman	Struktural	Kekeringan Epidemi
8.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan tablet Chloramine – dikelola oleh masyarakat Penyediaan tawas (untuk pengendapan) – dikelola oleh masyarakat 	Pengelolaan air minum pada masa darurat	Non-Struktural	
9.	<ul style="list-style-type: none"> Mempertinggi letak MCK agar tidak terendam banjir Sarana MCK masyarakat dibangun di lingkungan aman MCK untuk masing-masing keluarga 	Meningkatkan sarana sanitasi	Struktural	Banjir Epidemi
10.	<ul style="list-style-type: none"> Promosi dan pendidikan kesadaran hidup sehat 	Pemanfaatan air bersih, kesehatan, sanitasi dan pengelolaan air untuk keperluan rumah tangga pada saat banjir & kekeringan	Non-Struktural	Banjir / Kekeringan Epidemi
11.	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan peningkatan kesadaran bahaya malaria dan demam berdarah (dengue) 	Penyebab, gejala dan perawatan; langkah-langkah pencegahan & kesiapsiagaan	Non-Struktural	Epidemi
12.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan bubuk untuk larutan pencegah dehidrasi (oralit) – dikelola oleh masyarakat 	Tanpa dipugut biaya/ disubsidi/ pinjaman tanpa bunga untuk keluarga yang mendapat prioritas Termasuk pendidikan tentang kesehatan/ kebersihan & perawatan kasus diare	Non-Struktural	Epidemi

No.	Langkah Pengurangan Risiko	Keterangan/ Tujuan	Struktural/ Non-struktural	Anca- man
Kesehatan dan Gizi				
13.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dasar Pertolongan Pertama untuk para kepala keluarga dan atau para remaja 	Dikaitkan dengan bencana alam dan penyakit di wilayah setempat	Non-Struktural	Selu- ruhnya / beberapa
14.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran akan pentingnya vaksinasi & pemberantasan cacicng (untuk semua anak) 	Ditambah pemberian vitamin A dosis tinggi, suplemen zat besi dan yodium dan obat anti-cacing.	Non-Struktural	Selu- ruhnya / beberapa
15.	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi dan pendidikan pentingnya hidup sehat 	Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air (dan prioritas lainnya) – penyebab, gejala dan cara-cara perawatan, termasuk pencegahannya.	Non-Struktural	Banjir Kekerin- gan
16.	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi dan pendidikan gizi yang baik 	Berkait dengan cara hidup sehat (pertumbuhan & perkembangan anak), kecukupan pangan – menggalakan kebun di rumah	Non-Struktural	Banjir Kekerin- gan
17.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan peningkatan kesadaran bahaya malaria dan demam berdarah (dengue) 	Penyebab, gejala dan cara-cara perawatan, termasuk pencegahannya.	Non-Struktural	Epidemi
18.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan penyadaran tentang bahaya Flu Burung 	Penyebab, gejala dan cara-cara perawatan, termasuk pencegahannya.	Non-Struktural	Epidemi

No.	Langkah Pengurangan Risiko	Keterangan/ Tujuan	Struktural/ Non-struktural	Anca- man
19.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan kebutuhan obat-obatan dasar dan bubuk untuk larutan pencegah dehidrasi (oralit) – dikelola oleh masyarakat 	Tanpa dipungut biaya/disubsidi/pinjaman tanpa bunga untuk keluarga yang mendapat prioritas Termasuk pendidikan tentang kesehatan/kebersihan & pelatihan perawatan kasus diare	Non-Struktural	Banjir / Kekeringan Epidemi
20.	<ul style="list-style-type: none"> Perahu untuk mengevakuasi anggota masyarakat – dilengkapi mesin 	Darurat medis; dan evakuasi (manusia, ternak & barang berharga)	Struktural	Banjir
21.	<ul style="list-style-type: none"> Perahu ukuran kecil untuk para petugas kesehatan, relawan PMI, bidan atau dukun beranak. 	Memastikan agar petugas kesehatan, bidan atau dukun beranak dan relawan PMI dapat memberikan bantuan medis pada saat diperlukan	Struktural	Banjir
22.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan bahan bakar kayu kering untuk masa darurat 	Wanita hamil dan bidan atau dukun beranak	Non-Struktural	Banjir
Produksi agrikultural (pertanian dan ternak – termasuk pembudidayaan perikanan)				
23.	<ul style="list-style-type: none"> Pintu air & saluran air di bawah tanah; saluran-saluran pembuangan; Peninggian tepi waduk & tanggul beton 	Struktur pengendali air guna mengamankan atau melindungi pemukiman (mencegah air banjir)	Struktural	Banjir

No.	Langkah Pengurangan Risiko	Keterangan/ Tujuan	Struktural/ Non-struktural	Anca- man
24.	<ul style="list-style-type: none"> • Peninggian tepi waduk (penampungan) • Kolam irigasi rumah tangga & masyarakat (penampungan) • Lubang irigasi – pompa tangan & pompa bermotor (produksi) • Saluran-saluran atau pompa-pompa air (bermesin) untuk air permukaan (penyaluran) 	Membangun atau merehabilitasi prasarana irigasi	Struktural	Banjir
25.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran pada kemungkinan perubahan pola bercocok tanam dan praktek produksi tanaman padi (dan tanaman pangan lainnya) 	Misalnya peningkatan varietas padi dan teknik pengelolaan lahan pertanian untuk padi, non-padi dan tanaman pangan yang cepat menghasilkan	Non-Struktural	Banjir / Kekeringan
26.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan agrikultural: tanaman berbuah (buah-buahan, pakan ternak, dll. 	Mencegah banjir atau kekeringan. Termasuk cara-cara pembibitan & sarana-saran lainnya	Non-Struktural	Banjir / Kekeringan
27.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan agrikultural: Penanaman sayuran pada perkebunan di dataran tinggi, dan/atau tanaman pangan di air 	Mencegah banjir. Termasuk cara-cara pembibitan & sarana-saran lainnya	Non-Struktural	Banjir Wabah / penyakit
28.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan agrikultural: Peningkatan keragaman tanaman pertanian (khususnya kebun rumah tangga seperti buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, rempah-rempah, dll) 	Mencegah kekeringan. Termasuk cara-cara pembibitan & sarana-saran lainnya	Non-Struktural	Kekeringan Wabah / penyakit
29.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan agrikultural: tanaman selingan & teknik-teknik tanaman ganda (tumpang sari) 	Mencegah banjir atau kekeringan. Termasuk cara-cara pembibitan & sarana-saran lainnya	Non-Struktural	Banjir / Kekeringan Wabah / penyakit

No.	Langkah Pengurangan Risiko	Keterangan/ Tujuan	Struktural/ Non-struktural	Anca- man
30.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan agrikultural: Sistem penanaman padi intensif. 	Mencegah banjir. Termasuk cara-cara pembibitan & sarana-saran lainnya	Non-Struktural	Banjir Kekerin- gan
31.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan agrikultural: Penggunaan pupuk hijau dan kompos 	Mencegah banjir atau kekeringan. Termasuk cara-cara pembibitan & sarana-saran lainnya, seperti bahan-bahan dan peralatan.	Non-Struktural	Banjir / Kekerin- gan
32.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan agrikultural: Pengelolaan hama terpadu 	Ditujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida dan penyubur tanaman pada perikanan dan sumber-sumber alam perairan lainnya. Diberikan tambahan lain yang diperlukan.	Non-Struktural	Epidemi Kekerin- gan
33.	<ul style="list-style-type: none"> Lumbung padi 	Lumbung penyimpanan beras & sistem pengelolaannya oleh masyarakat	Non-Struktural	Banjir / Kekerin- gan Wabah / penyakit
34.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan mengembangkan ikan (akuakultur) Kolam ikan atau keramba (kandang terapung) 	Misal, membudidayakan pembibitan ikan. Diberikan tambahan sesuai keperluan (alat, bibit dll)	Non-Struktural & Struktural	Banjir
35.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan memelihara ternak untuk menghadapi situasi banjir/keke- ringan/wabah 	Kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, dll., termasuk pemberian vaksinasi pada ternak	Non-Struktural	Sebagian / Seluruh- nya

No.	Langkah Pengurangan Risiko	Keterangan/ Tujuan	Struktural/ Non-struktural	Anca- man
36.	<ul style="list-style-type: none"> Mengadvokasi Dinas Peternakan untuk melaksanakan vaksinasi ternak pada saat sebelum banjir 	Khususnya kerbau, kambing, sapi dan babi	Non-Struktural	Banjir
37.	<ul style="list-style-type: none"> Memelihara ternak di lingkungan aman – rumah tangga dan/atau masyarakat 	Kerbau, kambing, sapi, babi, kuda	Struktural	Banjir
38.	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan sistem pengelolaan keselamatan ternak oleh masyarakat pada saat banjir, khususnya tempat mencari makan Mengelola sumber-sumber pakan ternak 	Termasuk bermusawarah dengan desa-desa di sekitarnya untuk mendapatkan hak di lahan rerumputan, atau perolehan ikan, pertukaran pakan ternak, dll.	Non-Struktural	Banjir
Sumber Kekayaan Bersama dan Pengelolaan Sumber Daya Alam				
39.	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong secara aktif manajemen perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam oleh masyarakat 	Misalnya, hutan, lahan rerumputan, lahan basah, danau, sungai, perikanan dll.	Non-Struktural & Struktural	Seluruhnya / beberapa
40.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan manajemen pengelolaan lahan pertanian 	Khususnya perlindungan terhadap habitat yang dilindungi	Non-Struktural	Seluruhnya / beberapa
41.	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman kembali tanaman kayu untuk bahan bakar, misalnya akasia 	Di desa dan sekitarnya	Non-Struktural & Struktural	Banjir Kekeringan
42.	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman kembali hutan alam dan padang rumput Mempromosikan program penanaman kembali hutan oleh masyarakat Perlindungan dari eksploitasi oleh pihak luar – agar sumber-sumber yang bernilai tersebut tetap tersedia pada masa darurat bencana 	Misal, bambu, rotan, rumput, buah-buahan, pakan ternak, bahan bakar kayu dan apotik hidup (obat-obatan tradisional, resin, minyak gosok dll)	Non-Struktural & Struktural	Banjir Kekeringan Wabah / penyakit

No.	Langkah Pengurangan Risiko	Keterangan/ Tujuan	Struktural/ Non-struktural	Anca- man
43.	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman kembali hutan di sekitan bantaran sungai (bambu, rerumpunan, dll.) 	Mengurangi erosi bantaran sungai dan dampak aliran arus & gelombang di lingkungan pedesaan	Non-Struktural & Struktural	Banjir
44.	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman kembali hutan bakau 	Mengurangi abrasi pantai dan dampak tsunami		
45.	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman kembali hutan di sekitar desa 	Mengurangi aliran arus banjir. Misalnya hantaman eceng gondok pada saat banjir. Memberikan keteduhan dan sumber bahan bakar.		
Aset Rumah Tangga dan Masyarakat				
46.	<ul style="list-style-type: none"> • Peninggian lahan bagi rumah-rumah yang berada di lokasi rawan terhadap banjir • Pilar beton • Kayu dan kawat pengikat (pasak) • Perubahan desain (misal, menggunakan dinding di bagian bawah dapat dilepas, untuk aliran air banjir) 	Ditujuan khususnya rumah rentan atau rawan terhadap banjir	Struktural	Banjir Badai
47.	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Sibatan dan masyarakat untuk membangun atau memperbaiki rumah 	Memberikan bantuan sejumlah rumah tangga kelompok rentan (misalnya janda dengan banyak anak, orang yang sebatang kara atau lanjut usia)	Non-Struktural	Banjir Badai
48.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan wilayah yang aman bagi keluarga 	Untuk perumahan, kebun sayur atau ternak	Struktural	Banjir

No.	Langkah Pengurangan Risiko	Keterangan/ Tujuan	Struktural/ Non-struktural	Anca- man
49.	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan lokasi yang aman bagi masyarakat, lokasi yang lebih tinggi dan mengorganisir komite manajemen wilayah aman 	Misalnya, mengorganisir bantuan tenda darurat, keamanan (penjaga malam)	Non-Struktural	Banjir
50.	<ul style="list-style-type: none"> Gentong plastik anti bocor yang dapat mengapung dan amplop kedap air 	Menjaga agar surat berharga tetap ke ring – termasuk dokumen penting (kartu identitas, buku keluarga, sertifikat tanah, sertifikat kepemilikan, album foto dll.)	Non-Struktural	Banjir
51.	<ul style="list-style-type: none"> Jalur atau rute evakuasi dan rehabilitasi Konstruksi jembatan dan rehabilitasi 	Semata-mata untuk tujuan evakuasi (khususnya sebagai petunjuk ke wilayah aman)	Struktural	Banjir
52.	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok rekonstruksi darurat untuk perbaikan tanggul dan bantaran sungai (melibatkan pemerintah daerah setempat) 	Pengadaan kantong pasir pelindung bagi perumahan rawan banjir dan peralangan lainnya	Struktural	Banjir
Peningkatan pendapatan dan penghidupan lainnya				
53.	<ul style="list-style-type: none"> Penghidupan keluarga atau perahu untuk evakuasi 	Evakuasi keluarga, peningkatan mobilitas dan kegiatan mata pencaharian	Struktural	Banjir
54.	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan nelayan (jaring, senar dan kail) 	Jaring ikan – untuk nelayan yang mengalami kerusakan atau kehilangan perahu atau jaring ikan Senar dan kail – bagi mereka yang tidak memiliki perahu dan/ atau jaring ikan	Struktural	Banjir

55.	<ul style="list-style-type: none"> Memperkenalkan sektor usaha mikro informal 	Misalnya, menjahit, membuat tikar, membudidayakan jamur	Non-Struktural	Seluruhnya / beberapa
56.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pendapatan keluarga/kesempatan kerja di lingkungan pedesaan 	Misalnya, pelatihan kerajinan menganyam eceng gondok.	Non-Struktural	Seluruhnya / beberapa
57.	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan metode pemrosesan, pengawetan dan penyimpanan makanan 	Misalnya, mangga kering, pisang, kelapa, ikan dan daging kering, asap atau asin.	Non-Struktural	Banjir
Peningkatan kesadaran akan Sistem Peringatan Dini (SPD), informasi bencana, rencana evakuasi dan ancaman bahaya lainnya				
58.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya banjir; kesadaran akan risiko banjir dan langkah-langkah Kesiapsiagaan dasar 	Terkait dengan ramalan banjir & peningkatan kesadaran akan peringatan dini	Non-Struktural	Banjir
59.	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung akses terhadap prakiraan 3 hari sebelum bencana banjir & sistem peringatan dini Mendukung penyebarluasan prakiraan banjir 3 hari sebelum kejadian dan peringatan dini di lingkungan (dan antara) pedesaan 	<p>Misalnya, melalui radio VHF atau telepon</p> <ul style="list-style-type: none"> Papan pengumuman publik Sistem pengumuman publik / sistem yang menjangkau bagian wilayah terjauh Strategi untuk melaksanakan diseminasi / menjangkau kelompok marginal 		

60.	<ul style="list-style-type: none"> Peringatan terhadap prakiraan badai (akses terhadap prakiraan cuaca) dan mekanisme peringatan/alarm 	Khususnya kepada mereka yang berkecimpung dalam perikanan, produsen pakan ternak dan yang mengumpulkan bahan bakar kayu dengan perahu. Alarm atau pengeras suara untuk peringatan.	Non-Struktural	Badai
61.	<ul style="list-style-type: none"> Mengadvokasi dan mendorong radio dan stasiun TV setempat untuk menyiarkan prakiraan bencana banjir & peringatan awal banjir dan badai awal 	Mungkin disponsori oleh perusahaan swasta	Non-Struktural	Banjir Badai
62.	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran terhadap tanah longsor Secara rutin Tim Sibit melakukan patroli, mengamati tanda-tanda awal terjadinya tanah longsor. 	Guna evakuasi sebelum terjadinya tanah longsor	Non-struktural	Hujan deras
63.	<ul style="list-style-type: none"> Pesawat radio VHF 	Untuk komunikasi dua arah dengan para tokoh masyarakat	Non-Struktural	Seluruhnya / beberapa
64.	<ul style="list-style-type: none"> Evakuasi keluarga/perahu penyelamat 	Evakuasi keluarga; peningkatan mobilitas & kegiatan ekonomi	Struktural	Baanjir
65.	<ul style="list-style-type: none"> Perahu evakuasi masyarakat – dengan atau tanpa mesin 	Evakuasi (orang, ternak & harta); darurat medis		
66.	<ul style="list-style-type: none"> Jaket penyelamat/ban dalam mobil/ peluit, sirine atau lonceng) untuk penyelamatan darurat 	Untuk keluarga yang memiliki anak-anak, keluarga yang berada di tempat yang jauh.	Non-Struktural	Banjir

67.	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Evakuasi Banjir Desa – termasuk persiapan evakuasi medis darurat 	Terutama bagi mereka yang rentan (misalnya, ODHA/ orang dengan HIV/ Aids, penderita TBC, anak-anak, ibu hamil dan ibu yang baru saja melahirkan, lansia dll).	Non-Struktural	Banjir
68.	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pertolongan Korban Banjir 	Kelompok penolong yang terlatih, jaket penyelamat, lampu senter, ban dalam mobil untuk keluarga yang rentan	Non-Struktural	Banjir
Permasalahan lintas sektor, penyelamatan dan strategi pengentasan masalah lainnya				
69.	<ul style="list-style-type: none"> Secara rutin memperbarui daftar ancaman bahaya tertentu bagi keluarga dan perorangan yang rentan (memperbarui peta risiko setahun sekali) 	Menentukan kriteria & metodologi pemilihan & transpransi	Non-Struktural	Banjir
70.	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok swadaya masyarakat untuk dukungan terhadap anak-anak 	Karenanya orang tua dapat bekerja di luar rumah	Non-Struktural	Banjir
71.	<ul style="list-style-type: none"> Pelajaran berenang untuk anak-anak (khususnya perempuan) 	Agar lebih mampu menyelamatkan diri jika terjadi tsunami atau banjir bandang	Non-Struktural	Banjir
72.	<ul style="list-style-type: none"> Penyimpanan beras oleh masyarakat (untuk pangan) - dibeli sebelum musim banjir (pada kondisi harga yang lebih rendah) 	Distribusi dilakukan oleh masyarakat (gratis/disubsidi/ utang tanpa bunga) untuk para keluarga rentan yang telah diidentifikasi	Non-Struktural	Banjir

73.	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kecukupan bahan bakar untuk memasak selama terjadinya banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Terutama di antara rumah tangga yang rentan Kompore berbahan bakar efisien 	Non-Struktural	Banjir
74.	<ul style="list-style-type: none"> Mengorganisir pencarian ikan secara kelompok (atau berpasangan) 	Terutama di saat berisiko tinggi pada siang/malam hari	Non-Struktural	Banjir/ Badai
75.	<ul style="list-style-type: none"> Advokasi kepada penguasa untuk menyediakan lahan kosong bagi para keluarga yang kehilangan rumah atau lahan pertanian karena mengalami erosi bantaran sungai 		Non-Struktural	Banjir
76.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesadaran tentang persoalan yang terkait dengan musim & migrasi akibat bencana dalam rangka kesempatan kerja 	HIV, lalu lintas manusia, pelacuran, perjudian, kecelakaan lalu lintas, dll.	Non-Struktural	Seluruhnya/ beberapa
77.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesadaran tentang berbagai permasalahan sosial di lingkungan pedesaan 	HIV, lalu lintas manusia, perjudian, kekerasan rumah tangga		

Palang Merah Indonesia – Divisi Penanggulangan Bencana

Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat
Januari 2007

DAFTAR SINGKATAN

3 M	Menguras, Menutup, Menimbun
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BKRK	Bahaya, Kerentanan, Risiko dan Kapasitas (lihat juga HVRC)
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBN	Badan Penanggulangan Bencana Nasional
BPD	Badan Perwakilan Desa
BPI	Better Programming Initiative
CBDP	Community Based Disaster Preparedness (lihat juga KBBM)
CBFA	Community Based First Aid
Diklat	Pendidikan dan pelatihan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRC	Danish Red Cross
HVRC	Hazard, Vulnerability, Risk and Capacity
IFRC	International Federation of Red Cross and Red Crescent
KAP	Knowledge, Attitude and Practice (lihat juga PKS)
KAPASITAS	Kemitraan, Advokasi, Pemberdayaan, Analisis Risiko dan Kerentanan, Swadaya, Integrasi, Terfokus, Aksi nyata, Sustainability
KBBM	Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat
Kimpraswil	Permukiman dan Prasarana Wilayah
KSR	Korps Suka Rela
LFA	Logical Framework Approach
LPM	Lembaga Pengembangan Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat (lihat juga Ornop)
MCK	Mandi, Cuci, Kakus
MoA	Memorandum of Agreement
Ornop	Organisasi nonpemerintah
PB	Penanggulangan Bencana
PBP	Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Pemda	Pemerintah Daerah
PHC	Primary Health Care (lihat juga PKD)
PIMES	Planning, Implementation, Monitoring and Evaluation System
PKD	Pendidikan Kesehatan Dasar
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PKS	Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan
PMI	Palang Merah Indonesia
PMR	Palang Merah Remaja
Polindes	Pos Persalinan Desa
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PRA	Participatory Rural Assesment
Protap	Prosedur Tetap

PU	Pekerjaan Umum
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SAR	Search and Rescue
Sibat	Siaga Bencana Berbasis Masyarakat
TSR	Tenaga Suka Rela
VCA	Vulnerability and Capacity Assesment
WHO	World Health Organizations

DAFTAR ISTILAH

Baseline Survey	Survey data dasar yang biasa dilakukan sebelum memulai kegiatan dalam sebuah program.
Bottom-up	Dari bawah ke atas atau partisipasi masyarakat. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama program.
Desentralisasi	Memberikan suatu wilayah hak untuk membuat kebijakan dan merealisasikannya (kebalikan dari sentralisasi).
Do not harm	Intervensi dari sebuah lembaga atau program agar suatu program bisa terlepas dari konflik.
Drainase	Sistem saluran pembuangan air.
Input	Masukan-masukan untuk keberhasilan suatu program.
Kelambunisasi	Penyuluhan akan pentingnya menggunakan kelambu saat tidur agar terhindar dari gigitan nyamuk.
Larvading	Menebar ikan nila, sebagai pemakan jentik-jentik nyamuk.
Lessons learnt	Upaya mendapatkan pelajaran dari pengalaman di tempat-tempat lain.
Master plan	Kerangka dasar.
Mitigasi	Meringankan atau meminimalkan dampak bencana.
Output	Proses atau hasil dari suatu program.
Program KBBM	Program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil inisiatif dan tindakan-tindakan meminimalkan dampak bencana yang terjadi di lingkungannya.
Rehabilitasi	Upaya mengembalikan seperti keadaan semula pascabencana.
Rekonstruksi	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pascabencana.
Survey KAP	Dimaksudkan untuk mendapatkan secara mendalam pengetahuan, persepsi, sikap, dan ketrampilan yang terkait dengan satu masalah yang diprioritaskan.
Sustainability	Keberlanjutan suatu program, terutama setelah program tersebut berakhir.
The first responder	Masyarakat mampu melakukan upaya pertolongan atau penyelamatan diri, keluarga, maupun warga masyarakat lainnya.
Tools	Perangkat atau alat yang dibutuhkan dalam suatu program.
Top-down	Menempatkan masyarakat hanya sebagai pelaksana, bukan sebagai pemilik program yang telah direncanakan oleh pemerintah/lembaga tanpa melibatkan langsung masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.